



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2008-2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Untung Surapati Nomor 2 Semarapura Telp. (0366) 21382, Fax. (0366) 24100

Email : bappeda_klungkung@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
1. Maksud	2
2. Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD	7
2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat (Renstra SKPD)	7
3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	8
E. Kerangka Pikir dan Sistematika Penulisan	8
1. Kerangka Pikir	8
2. Sistematika Penulisan	9
BAB II KONDISI UMUM	10
A. Gambaran Umum Wilayah	10
B. Kondisi Fisik Dasar	10
1. Kondisi Fisiografi Tanah	10
1) Tofografi	11
2) Kondisi Geologi	11
3) Tekstur Tanah	12
4) Jenis Tanah	12
2. Kondisi Klimatologi	13
3. Kondisi Hidrologi	14
a) Air Sungai	14
b) Air Danau/Waduk	16
c) Mata Air	16
C. Kondisi Wilayah Laut Dan Pesisir	17
D. Kondisi Sumber Daya Hutan	19
E. Pola Penggunaan Lahan	19
1) Tanah Sawah	20
2) Tanah Kering	21
3) Lahan Lainnya	22
F. Kondisi Perekonomian Daerah	23
1. Perkembangan PAD, DAK dan DAU	24

2. PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2009	24
3. Komponen PDRB	25
1. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	25
2. Peternakan, Perikanan dan Kelautan	30
3. Penggalian dan Pertambangan	31
4. Industri	33
5. Perdagangan	34
6. Listrik dan Air Minum	34
4. Kemiskinan dan Desa Tertinggal	37
G. Kondisi Kependudukan	39
1. Jumlah dan Distribusi penduduk	39
2. Kualitas Penduduk	40
H. Sistem Transportasi	44
1. Transportasi Darat	44
2. Prasarana Transportasi Laut	47
I. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	49
1. Fasilitas Rumah Tinggal	49
2. Fasilitas Kesehatan	49
3. Fasilitas Peribadatan	51
4. Fasilitas Perdagangan	52
5. Fasilitas Pendidikan	52
6. Fasilitas Pemerintah dan Pelayanan Umum	54
7. Fasilitas Penunjang Pariwisata	55
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	58
A. Faktor Lingkungan Internal	59
1. Kekuatan (Strength)	59
2. Kelemahan (Weakness)	59
B. Faktor Lingkungan Eksternal	60
1. Peluang (Opportunities)	60
2. Ancaman (Thread)	61
C. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	62
D. Strategi Berdasar Analisis SWOT	63
E. Analisis Lingkungan Strategis Perekonomian Daerah	65
1. Pertumbuhan Ekonomi	65
2. Investasi	67
3. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	67
4. Pertanian	69
5. Ketahanan Pangan	70
6. Kehutanan dan Perkebunan	71
7. Perikanan dan Kelautan	73
8. Energi dan Sumber Daya Mineral	74
9. Pariwisata	75

F.	Analisis Lingkungan Strategis Sosial Budaya	76
1.	Kependudukan	76
2.	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	76
3.	Kesejahteraan Sosial	77
4.	Kesehatan	77
5.	Pendidikan	78
6.	Kebudayaan	78
7.	Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja	79
8.	Pemuda dan Olahraga	80
9.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	81
10.	Penanggulangan Bencana	81
G.	Analisis Lingkungan Strategis Prasarana dan Sarana	82
1.	Transportasi	82
2.	Sumber Daya Air	84
3.	Air Minum/ Air Bersih	85
4.	Air Limbah/Sanitasi	85
5.	Persampahan dan Drainase	86
6.	Perumahan dan Permukiman	87
7.	Listrik	87
8.	Komunikasi dan Informatika	88
H.	Analisis Lingkungan Strategis Struktur Dan Pola Tata Ruang	89
1.	Struktur Tata Ruang Daerah Kabupaten Klungkung	89
2.	Pola Ruang Daerah Kabupaten Klungkung	90
I.	Pemerintahan Hukum dan Politik	91
1.	Pemerintahan	91
2.	Hukum	92
3.	Politik	92
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		94
A.	Visi	94
B.	Misi	95
C.	Program	96
D.	Program Unggulan	98
E.	Tujuan Pembangunan Daerah	98
F.	Sasaran Pembangunan Daerah	101
1.	Peningkatan Perekonomian Daerah	101
2.	Peningkatan Daya Saing Daerah	101
3.	Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan	102
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH		107
A.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	107
B.	Pengelolaan Belanja Daerah	121

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah	123
D. Kebijakan Umum Anggaran	131
1. Pendapatan Daerah	131
2. Belanja Daerah	132
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR	135
A. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	135
1. Strategi Pembangunan Pemerintah	135
2. Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia	137
3. Strategi Pembangunan Ekonomi	138
4. Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama	140
5. Strategi Pembangunan Penataan Sarana dan Prasarana Wilayah	142
B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	143
1. Peningkatan Kualitas Hidup	143
2. Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama	145
3. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan	147
4. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi	148
5. Pengembangan Usaha Daerah	150
6. Pengembangan Perdagangan	151
7. Pembangunan Koperasi	152
8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	153
9. Pengelolaan Perikanan, Peternakan dan Kelautan serta Pesisir	153
10. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan	155
11. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	156
12. Penataan Tata Ruang	157
13. Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Masa	158
14. Hukum	159
15. Pembangunan Perumahan dan Permukiman	160
16. Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	160
C. Program dan Indikator Pembangunan Daerah	161
1. Program SKPD	161
2. Program Lintas SKPD	161
3. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah	162
BAB VII PENUTUP	213
A. Program Transisi	213
B. Kaedah Pelaksanaan	214

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RPJP daerah propinsi dan kabupaten kota berpedoman kepada RPJP nasional yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden. Sedangkan penyusunan RPJP daerah kabupaten/kota selain berpedoman kepada RPJP nasional juga berpedoman pada RPJPD Provinsi.

Pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah adalah analog dengan perencanaan pembangunan nasional yang memuat beberapa hal utama. Perencanaan RPJP Daerah memuat visi misi dan arah pembangunan daerah mengacu pada RPJP Nasional, dan RPJP Kabupaten/Kota selain mengacu pada RPJPN juga mengacu pada RPJPD Provinsi. Demikian juga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah adalah merupakan penjabaran visi misi daerah selama lima tahunan. Penyusunan RPJM Kabupaten/Kota selain merupakan penjabaran visi misi selama lima tahunan dari Bupati/Wakil Bupati terpilih, juga berpedoman kepada RPJP Nasional, RPJP Provinsi, RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pasal 19 menyatakan RPJM-D ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik,

dengan Peraturan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan resmi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten setiap tahunnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) ialah merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, dalam hal ini daerah Kabupaten Klungkung. RPJMD ini disusun agar Pemerintah Kabupaten Klungkung mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional serta tuntutan Global yang dinamis.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

RPJM Daerah Kabupaten Klungkung disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah Kabupaten secara khusus bertujuan untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, serta merumuskan program pembangunan daerah selama lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan strategi dan kebijakan umum serta perumusan program melalui evaluasi pembangunan lima tahun yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat peramalan serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai kewenangan daerah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

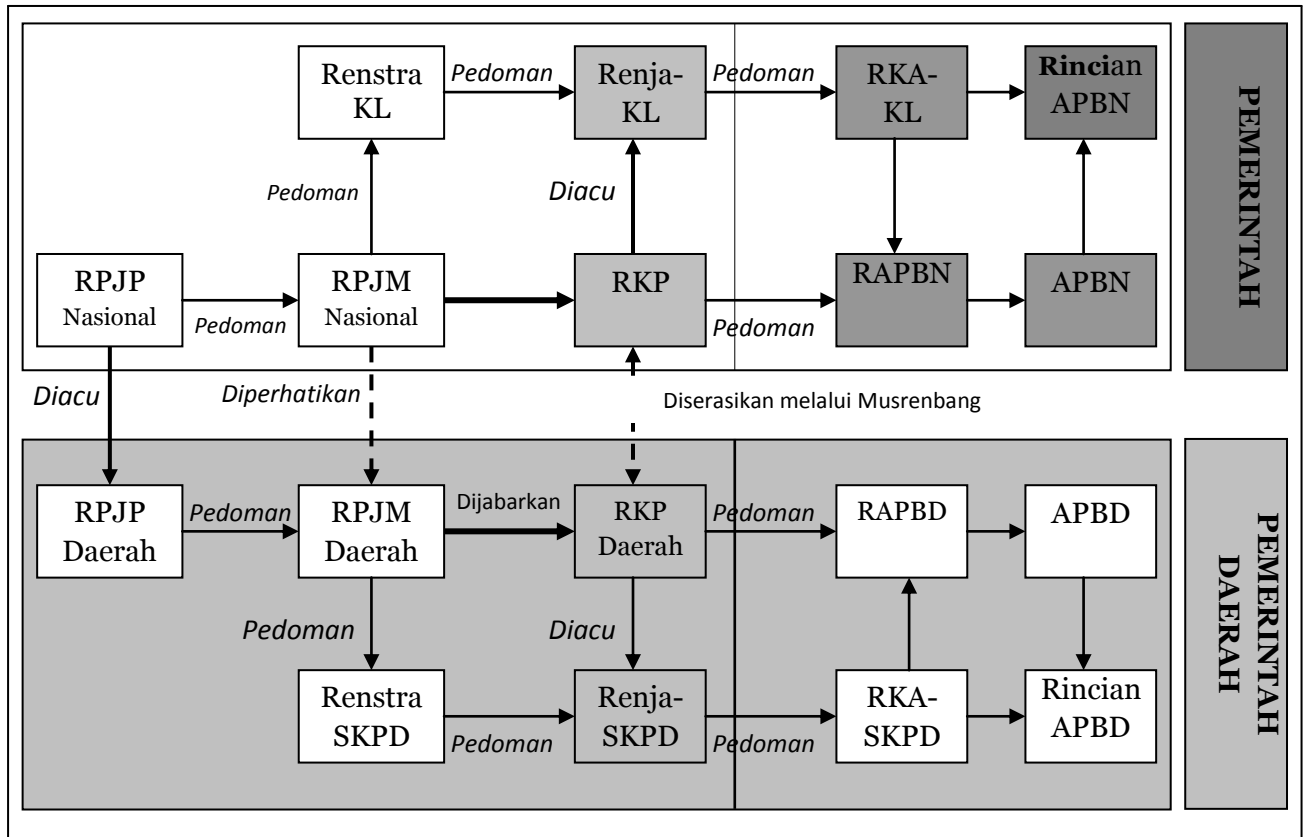
1. Landasan Idiil
Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional
Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional
 - a. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - p. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
 - q. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

D. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJP Daerah menjadi acuan untuk menyusun RPJM Daerah yang bersangkutan. Hubungan-hubungan antara RPJP Nasional dan Daerah disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1.
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah

Keterangan:

- Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode lima tahun.
- Renja-KL atau Rencana Kerja Kementrian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode satu tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunanan Nasional).
- RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga), adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya.
- Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.

- f. Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- h. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJM Daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJM Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.

2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

RPJM Daerah Kabupaten Klungkung juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

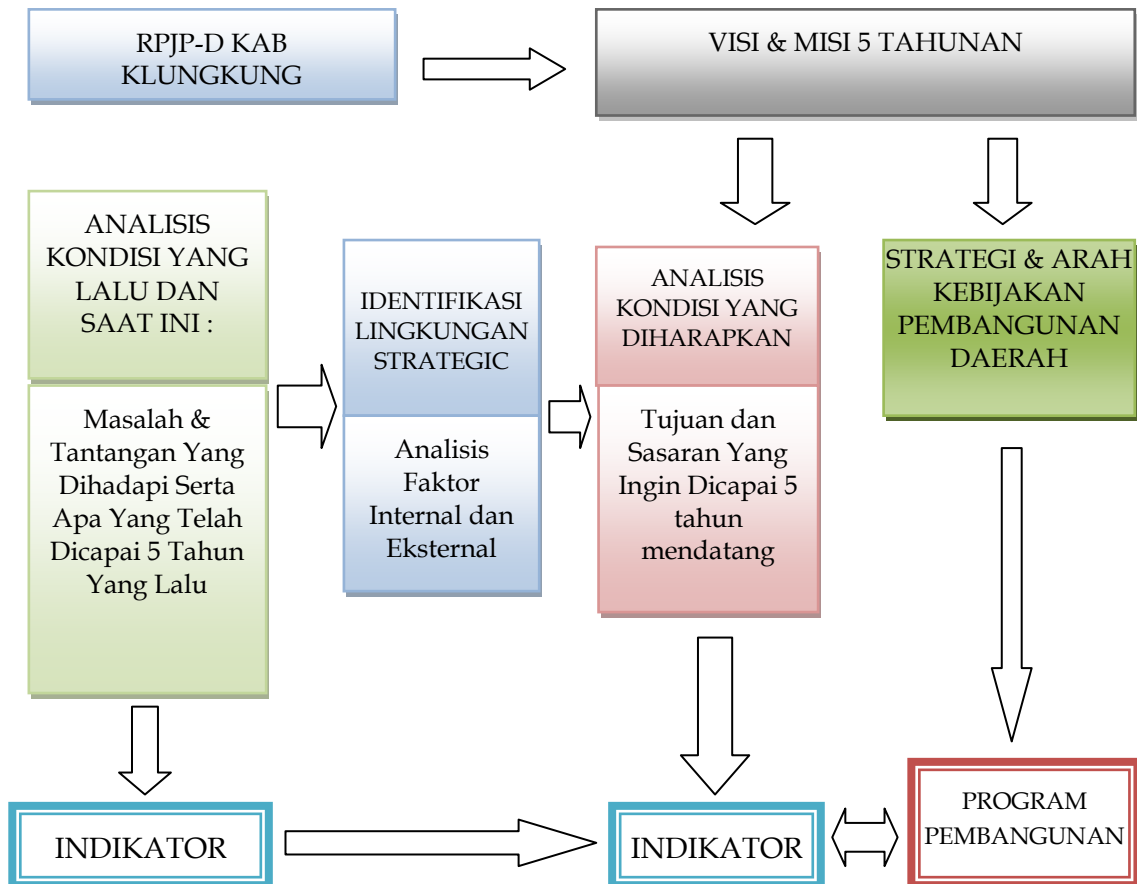
3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Sesuai Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah”. Dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SPPN disebutkan “*RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat*”.

E. KERANGKA PIKIR DAN SISTEMATIKA PENULISAN

1. Kerangka Pikir

Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung 2008–2013 diawali dengan analisis kondisi masa lalu dan saat ini, yang menyangkut hasil yang telah dicapai dan masalah serta tantangan yang dihadapi, kemudian dilakukan identifikasi lingkungan strategik internal dan eksternal. Perumusan visi dan misi, analisis kondisi yang diharapkan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan yang dilakukan dengan mengacu hasil analisis lingkungan strategik dan tahapan lima tahunan dalam RPJPD. Kerangka pikir penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.

Kerangka Pikir Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung

2. Sistematika Penulisan

RPJMD Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum
- Bab III : Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator
- Bab VII : Penutup

BAB II KONDISI UMUM

A. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota di Bali dengan luas wilayah 315 km² atau 5,59% dari luas Propinsi Bali. Terletak 115°21'28''-115°37'43''BT dan 80°27'37''- 80°49'00''LS dengan batas-batas :

Sebelah utara : Kabupaten Bangli

Sebelah timur : Kabupaten Karangasem

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar

Secara fisik wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya (112,16 Km²) terletak di daratan Pulau Bali dan dua pertiganya (202,84 Km²) lagi merupakan daerah kepulauan yaitu : Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Kabupaten Klungkung memiliki 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Nusa Penida dengan 59 desa/kelurahan, 241 dusun, 106 desa adat dan 393 banjar adat. Kecamatan Nusa Penida memiliki luas terbesar diantara kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 64,39% (lihat Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Luas Wilayah di Tiap-Tiap Kecamatan di Kabupaten Klungkung
Tahun 2006

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Prosentase (%)
1.	Banjarangkan	45,73	14,52
2.	Klungkung	29,05	9,22
3.	Dawan	37,38	11,87
4.	Nusa Penida	202,84	64,39
Total		315	100

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007

B. Kondisi Fisik Dasar

1. Kondisi Fisiografi Tanah

Fisiografi berkaitan erat dengan bentukan-bentukan alam dipermukaan bumi. Bentukan alam ini terkait dengan topografi, geologi, dan tanah.

1) Topografi

Kecamatan Klungkung sebagian besar memiliki daerah yang datar sampai agak landai yaitu sebesar 78,47% dari total luas wilayah Kecamatan Klungkung. Sedangkan Kecamatan Nusa Penida sebagian besar wilayahnya termasuk dalam kategori agak curam (*moderately steep*) yaitu sebesar 47,53%, sedangkan daerah yang cenderung datar sampai landai yaitu mencakup 34,04% dari total luas wilayah Kecamatan Nusa Penida.

2) Kondisi Geologi

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung relatif aman, khususnya terhadap bahaya gunung berapi, karena di wilayah ini tidak dijumpai adanya gunung api. Namun berdasarkan peta geologi, formasi Qva dapat menjadi daerah potensi bencana bila Gunung Agung di Kabupaten Karangasem menunjukkan aktivitasnya.

Formasi geologi yang membentuk wilayah Kabupaten Klungkung meliputi : formasi volkan muda (Qva dan Qbb), Endapan Aluvium (Qal), Formasi Selatan (Msl), dan formasi Ulakan (Mu). Formasi vulkanik lainnya adalah Qbb yang meliputi sebagian Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dan Dawan. Formasi ini disusun oleh tufa dengan endapan hasil erupsi volkan-volkan yang ada di sekitar Kabupaten Klungkung, yaitu Gunung Buyan, Bratan dan Batur. Daerah ini juga merupakan daerah subur dan sangat berpotensi bagi pengembangan pertanian Kabupaten Klungkung. Bentuk lahan yang bervariasi menyebabkan lahan-lahan yang berada pada wilayah perbukitan dengan lereng terjal memiliki potensi erosi yang cukup tinggi.

Endapan Aluvium (Qal) merupakan daratan yang dibentuk karena proses pengendapan dari laut (*deposit marine*) tersebar di Kecamatan Klungkung, Dawan, dan Nusa Penida. Proses pengendapan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama menyebabkan majunya garis pantai ke arah laut. Daerah ini sangat berpotensi bagi pengembangan pertanian, khususnya bagi budidaya kelapa.

Formasi Msl dan Mu merupakan formasi endapan tersier, terdiri dari Formasi Selatan (Msl) yang tersusun terutama oleh batuan gamping dan dingskapan-dingskapan kecil formasi Ulakan (Mu) yang tersusun atas breksi gunung berapi, lava, tufa dengan sisipan batuan gamping. Kedua formasi ini terdiri dari bahan-bahan yang terbentuk dari proses sedimentasi bahan-

bahan klastik, kimia dan organik. Setelah mengalami sedimentasi, bahan-bahan tersebut mengalami lithifikasi sehingga membentuk batuan sedimen, seperti breksi (Mu) dan batuan gamping (Msl). Kedua formasi ini merupakan daerah yang berpotensi terhadap erosi.

Formasi selatan hanya meliputi : Kecamatan Nusa Penida, berbahan induk batuan gamping. Tanah yang terbentuk pada formasi ini bersifat basa. Kandungan P₂O₅ dan K₂O sedikit tinggi, kandungan CaO dan MgO sangat tinggi. Formasi ulakan meliputi sebagian Kecamatan Banjarangkan dan Dawan. Tanah yang terbentuk bersifat agak asam sampai netral, kandungan P₂O₅ dan K₂O sedang sampai tinggi, kandungan CaO dan MgO sedang.

3) Tekstur Tanah

Kabupaten Klungkung mempunyai tekstur tanah sedang seluas areal lebih kurang 29.568 Ha atau 93,87% dari luas Kabupaten Klungkung. Tekstur kasar seluas kurang lebih 1.932 Ha atau 6,13% sedangkan tekstur halus tidak terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung.

4) Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Klungkung dapat digolongkan atas :

a) Tanah Regosol Coklat Kelabu

Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Dawan, Klungkung dan Banjarangkan, seluas 245 Ha, dengan ciri terdiri atas bahan induk abu fukan intermedier, dengan bentuk wilayahnya berombak melandai.

b) Tanah Regosol Coklat Kekuningan

Banyak terdapat di Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung seluas 7.383 Ha. Tanah ini terdiri atas bahan induk abu vulkanik intermedier, dengan bentuk wilayahnya berombak melandai.

c) Tanah Mediteran Coklat

Tanah ini banyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida seluas 20.284 Ha. Jenis tanah ini terdiri atas bahan induk batuan gamping yang bentuk wilayahnya bergelombang sampai berbukit-bukit.

d) Tanah Regosol Coklat Kemerahan dan Litosol

Terdapat di Kecamatan Dawan dengan luas seluruhnya adalah 3.588 Ha. Tanah ini terdiri atas induk abu vulkanik intermedier dan dengan bentuk wilayah berbukit-bukit.

2. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Klungkung seperti halnya kebanyakan daerah lain di Indonesia memiliki iklim tropis, yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim Kemarau yang dalam kondisi normal akan terjadi pada bulan April-Oktober, dan musim Penghujan yang biasanya terjadi pada musim Oktober-April, dengan temperatur udara berkisar antara 27°C - 30,9 °C.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pencatatan curah hujan dilakukan di setiap kecamatan. Di Kecamatan Nusa Penida ada 3 tempat pengamatan yaitu Sampalan, Prapat dan Klumpu, sedangkan di Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung selama tahun 2008 berkisar 18 - 404 mm. Kecamatan dengan curah hujan tertinggi selama tahun 2008 yaitu Kecamatan Klungkung dengan total curah hujan 2.186 mm, tempat kedua Kecamatan Banjarangkan dengan total curah hujan 1.988 mm, ketiga Kecamatan Nusa Penida dengan curah hujan rata-rata 1562,67 mm dan keempat Kecamatan Dawan dengan total curah hujan 1.477 mm. Bulan Februari merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 1.569 mm selama tahun 2008, sedangkan bulan terkering yaitu bulan Juni dengan total curah hujan 72 mm.

Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan dari Tempat-tempat Terpilih di Kabupaten Klungkung Dirinci Per Bulan Tahun 2008

Bulan		Tempat Stasiun					
		Sampalan	Prapat	Klumpu	Banjarangkan	Klungkung	Dawan
1.	Januari	274	336	509	170	90	136
2.	Pebruari	176	275	473	238	185	222
3.	Maret	133	182	245	260	249	138
4.	April	141	73	194	18	77	67
5.	Mei	42	97	78	360	320	189
6.	Juni	-	1	3	38	22	8
7.	Juli	-	4	5	30	65	33
8.	Agustus	7	-	7	-	58	14
9.	September	-	-	25	39	100	98
10.	Oktober	60	77	126	325	392	127

11.	Nopember	181	139	269	263	404	245
12.	Desember	128	147	251	247	224	200
Jumlah		1.142	1.361	2.185	1.988	2.186	1.477

Sumber : Klungkung Dalam Angka 2009

Sedangkan di Pulau Nusa Penida sehubungan dengan letak geografis Pulau Nusa Penida yang dikelilingi oleh selat dan samudera berakibat pada tingkat kelembaban udara yang tinggi, rata-rata 84%, sementara dengan posisi yang berdekatan dengan Garis Katulistiwa maka penyinaran matahari untuk Kecamatan Nusa Penida sangat lama, dan hampir selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun.

3. Kondisi Hidrologi

a) Air Sungai

Sungai-sungai yang terdapat di Indonesia telah disusun atas unit-unit wilayah yang disebut dengan Satuan Wilayah Sungai (SWS). Di Bali satuan wilayah sungainya diberi nomor 03.01 yang kemudian dirinci menjadi 20 sub-SWS dan yang termasuk dan melewati Kabupaten Klungkung adalah 3 Sub SWS yaitu Sub SWS 03.01.17, 03.01.18 dan 03.01.20.

Sungai di Kabupaten Klungkung hanya terdapat di wilayah Klungkung Daratan yang mengalir secara tetap sepanjang tahun pada sungai yang menyebar di Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan. Sungai yang paling besar adalah Tukad Unda dengan debit minimum 1.480 liter/detik dan maksimum 8.899 liter/detik.

Selanjutnya Tukad Telaga Waja yang merupakan anak sungai dari Sub DAS Unda dengan debit rata-rata 2.430 liter/detik. Sedangkan di wilayah Klungkung Kepulauan (Kecamatan Nusa Penida) tidak terdapat sungai yang airnya mengalir sepanjang tahun.

Sedangkan di wilayah Klungkung Kepulauan, berdasarkan data tinggi curah hujan di wilayah Nusa Penida dan peta dasar Bakosurtanal, hampir semua sungai di Kecamatan Nusa Penida mempunyai jenis sungai musiman (intermittent), dimana debit aliran hanya ada pada musim hujan dengan intensitas yang cukup lama.

Sungai-sungai tersebut di atas saat musim kemarau tidak mengalirkan air sama sekali. Berikut ini akan disajikan penjelasan kondisi sungai-sungai tersebut di atas :

1) Tukad Penida

Tukad ini berada di Desa Sakti, sungai ini merupakan sungai musiman dengan catchment area terluas diantara sungai-sungai yang lainnya. sebagaimana tipikal sungai musiman, saat terjadi hujan debit yang dialirkan sungai akan sangat besar bahkan dalam kondisi tertentu dapat sampai meluap dan menggenangi daerah sekitar.

2) Tukad Prapat

Tukad ini terletak di Desa Ped yang berada di sebelah Barat Sampalan (Ibukota Nusa Penida). Berdasarkan luas catchment areanya sungai ini terbesar nomor dua setelah Tukad Penida. Melihat kondisi morfologi sungai ini menunjukkan bahwa saat terjadi hujan dengan intensitas yang besar debit yang melintasi sungai ini akan menggenangi daerah sekitarnya yang merupakan ladang masyarakat.

3) Tukad Bok

Tukad Bok berada di Desa Suana, potensi sungai ini untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber air sangat kecil, sebagaimana sungai di Pulau Nusa Penida yang lain, yang akan mengalirkan air saat terjadi hujan saja.

4) Tukad Bodong

Berada di Desa Ped, sebagaimana sungai-sungai lain yang berada di Kecamatan Nusa Penida, tukad ini juga hanya akan mengalirkan debit saat terjadi hujan saja.

5) Tukad/Sungai-sungai yang lain

Tipikal sungai-sungai di Kecamatan Nusa Penida, yang hanya mengalirkan air saat terjadi hujan saja dan jika ditinjau dari luas DAS kapasitas aliran yang melewati sungai tidak terlalu besar.

Dari data diatas, sungai yang mempunyai potensi dan luas DAS terbesar di Pulau Nusa Penida adalah Tukad Penida di Desa Sakti.

b) Air Danau/Waduk

Kabupaten Klungkung tidak memiliki danau alam sebagai sumber air. Namun saat ini terdapat rencana pembangunan sebuah danau buatan atau waduk muara yang berfungsi sebagai tampungan air untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air baku pada daerah pelayanannya. Waduk muara yang dimaksud adalah Waduk Muara Unda yang merupakan sebuah upaya mengembangkan kapasitas pasokan air baku dengan memanfaatkan air dari Tukad Unda yang berasal dari Desa Cemenggon ± 13 km sebelah utara Kabupaten Klungkung.

Sungai tersebut mengalir ke arah selatan melewati Kabupaten Klungkung dan bermuara di Teluk Benoa. Panjang Sungai Tukad Unda mulai dari Desa Cemenggon secara keseluruhan adalah ± 22 km. Anak-anak sungai utama dari Tukad Unda adalah Tukad Lanang dan Tukad Medih. Luas Daerah Pengaliran Sungai Tukad Unda di Denpasar dan muara masing-masing adalah 25,0 km² dan 37,7 km².

c) Mata Air

Mata air yang terdapat di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Mata Air yang Terdapat di Kabupaten Klungkung

No.	Mata Air	Debit (l/dt)	Lokasi	Keterangan
A. Klungkung Daratan				
1.	Lumbih	30	Desa Tohpati	Sudah dimanfaatkan
2.	Tirta Arum	20	Desa Nyalian	Sudah dimanfaatkan
3.	Yeh Embang	7	Desa Timuhun	Sudah dimanfaatkan
4.	Anakan Peras	4	Desa Selisihan	Belum dimanfaatkan
5.	Toya Bulan	6	Desa Selisihan	Belum dimanfaatkan
6.	Toya Anakan	10	Desa Manduang	Belum dimanfaatkan
7.	Tabu	4	Desa Manduang	Belum dimanfaatkan
8.	Suwung	5	Desa Manduang	Belum dimanfaatkan
9.	Kwanji	5	Desa Selat	Belum dimanfaatkan

No.	Mata Air	Debit (l/dt)	Lokasi	Keterangan
10.	Bajing	34	Desa Tegak	Sudah dimanfaatkan
11.	Tirta Bima	0,5	Desa Dawan Kaler	Sudah dimanfaatkan
12.	Pekideh	1	Desa Dawan Kaler	Belum dimanfaatkan
13.	Buanidak	1	Desa Dawan Kaler	Belum dimanfaatkan
14.	Bale Gandang	1	Desa Dawan Kaler	Belum dimanfaatkan
15.	Pengancukan	1	Desa Besan	Belum dimanfaatkan
16.	Ulun Taman	3	Desa Besan	Belum dimanfaatkan
17.	Siraman Dedari	-	Desa Jumpai	Belum dimanfaatkan
B. Klungkung Kepulauan				
1.	Guyangan	178	Desa Batukandik	Sudah dimanfaatkan
2.	Penida	200	Desa Sakti	Sudah dimanfaatkan
3.	Seganing	75	Desa Batumadeg	Belum dimanfaatkan
4.	Batumeling	25	Desa Batumadeg	Belum dimanfaatkan
5.	Tabuanan	17	Desa Sekartaji	Sudah dimanfaatkan
6.	Sekartaji	1,25	Desa Sekartaji	Belum dimanfaatkan
7.	Wates	0,25	Desa Tanglad	Sudah dimanfaatkan
8.	Angkal	1,50	Desa Suana	Belum dimanfaatkan
9.	Toyapakeh	20	Desa Toya Pakeh	Sudah dimanfaatkan

Sumber : Dinas PU Kabupaten Klungkung

C. Kondisi Wilayah Laut Dan Pesisir

Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai mencapai 90 km dengan panjang pantai di Klungkung Daratan sepanjang 20 km dan panjang pantai di Klungkung Kepulauan sepanjang 70 km. Pantai-pantai yang terdapat di wilayah Klungkung Daratan adalah Pantai Tegal Besar yang terletak di Desa Negari di Kecamatan Banjarangkan, Pantai Leping dan Pantai Sidayu yang terletak di Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Pantai Watuklotok terletak di wilayah Desa Tojan dan Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Pantai Kusamba

yang terletak di Kampung Kusamba Kecamatan Dawan, dan Pantai Goa Lawah di Desa Pesinggahan di Kecamatan Dawan.

Sedangkan pantai-pantai di wilayah Klungkung Kepulauan yang termasuk dalam Kecamatan Nusa Penida adalah :

1) Pantai Tanjung Sanghyang

Terletak di Pulau Nusa Lembongan dengan kondisi pantai berpasir putih dengan lebar berkisar 30 - 50 meter dan panjang pantai diperkirakan mencapai 250 meter.

2) Pantai Jungutbatu

Terletak di Pulau Nusa Lembongan dengan pantai berpasir putih dengan lebar berkisar 20 - 40 meter dan panjang pantai diperkirakan mencapai 350 meter.

3) Pantai Ceningan

Terletak di Nusa Ceningan dan berhadapan langsung dengan Nusa Lembongan.

4) Pantai Batununggul

Terletak di Nusa Penida, Desa Batununggul dengan daya tarik wisatanya adalah keindahan panorama alam, *view* Gunung Agung, sedangkan kondisi pantainya berpasir dengan tingkat abrasi yang cukup besar.

5) Pantai Toyapakeh

Terletak di Desa Toyapakeh dan atau pada koridor jalan Batununggul - Toyapakeh dengan kondisi pantai berpasir putih dan keindahan panorama laut.

6) Pantai Teluk Penida

Terletak di Desa Sakti daya tarik wisatanya adalah pantai berpasir yang landai, lebar pantai di perkirakan 50 - 100 meter dan panjangnya diperkirakan mencapai 15 meter.

7) Pantai Pasir Hug

Terletak di Desa Sakti dan pantai ini sulit dicapai, karena terlepas dari sistem jaringan jalan lingkar Nusa Penida kondisinya belum tersentuh pembangunan, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata (konsep resort).

8) Pantai Atuh

Terletak di Desa Pejukutan dan berhadapan langsung dengan Pulau Lombok. Pantai ini belum tersentuh pembangunan dan hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki terpisah dari sistem jaringan jalan lingkar Nusa Penida.

9) Pantai Suana

Terletak di Desa Suana dengan daya tarik wisatanya adalah keindahan alam perbukitan dari perairan Nusa Penida.

D. Kondisi Sumberdaya Hutan

Hutan merupakan sumber plasma nutfah yang perlu dipelihara dan dilindungi. Prosentase luas hutan di Kabupaten Klungkung terhadap luas Kabupaten Klungkung adalah 3,33%, prosentase terhadap luas Provinsi Bali adalah 0,19% dan prosentase terhadap hutan provinsi adalah 0,80%.

Kawasan hutan berdasarkan fungsinya di Kabupaten Klungkung dibagi menjadi dua jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Luas hutan lindung di Kabupaten Klungkung adalah 804,50 Ha sedangkan luas hutan produksi terbatas adalah seluas 244 Ha.

E. Pola Penggunaan Lahan

Kabupaten Klungkung memiliki luas lahan sebesar 31.500 Ha. Ditinjau dari penggunaan lahan, lahan di Kabupaten Klungkung dikategorikan menjadi 2 bagian besar penggunaan lahan, yaitu untuk lahan sawah dan bukan lahan sawah yang meliputi : lahan kering (tegal/kebun, pekarangan dan sekitarnya, hutan negara, tanaman perkebunan, hutan rakyat, tanah sementara yang tidak diusahakan, dan penggunaan lain-lain) dan lahan lainnya (rawa-rawa, tambak dan kolam). Dilihat dari penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 3.876 Ha, bukan lahan sawah 27.624 Ha (terdiri atas lahan kering 27.619 Ha dan lahan lainnya 5 Ha) bertambahnya lahan sawah diakibatkan adanya perubahan fungsi lahan galian C menjadi lahan sawah seluas 12 hektar di Kecamatan Dawan.

Ditinjau dari letak wilayah, penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung dapat digolongkan sebagai berikut :

a) Wilayah Klungkung Daratan :

- Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah (Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan dan Kecamatan Klungkung);
- Penggunaan lahan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran dan fasilitas pelayanan masyarakat di Ibukota Kabupaten (Kota Semarapura) dan kota-kota kecamatan;
- Penggunaan lahan untuk kegiatan permukiman.

b) Wilayah Klungkung Kepulauan :

- Penggunaan lahan untuk kegiatan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida (Kawasan Efektif Pariwisata Nusa Penida);
- Penggunaan lahan untuk kegiatan perdagangan, perkantoran dan fasilitas pelayanan masyarakat;
- Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering;
- Penggunaan lahan untuk kegiatan peternakan;
- Penggunaan lahan untuk kegiatan tanaman perkebunan/tanaman keras.

Berdasarkan data penggunaan lahan Tahun 2008, prosentase penggunaan lahan terbesar yaitu yang memiliki luas lahan diatas 15% dari total luas Kabupaten Klungkung adalah penggunaan lahan untuk tanaman perkebunan (31,94%), tegal (24,57%) dan pemanfaatan lain-lain (23,58%) sedangkan penggunaan lainnya adalah lahan sawah (12,33%), pekarangan (4,12%), hutan rakyat (2,09%), hutan negara (0,64%), dan lahan lainnya (0,02%). Secara lebih rinci uraian dari masing-masing penggunaan lahan ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Tanah Sawah

Penggunaan lahan untuk sawah di Kabupaten Klungkung bukan merupakan penggunaan lahan yang dominan. Berdasarkan data Tahun 2008 luas lahan untuk sawah hanya seluas 3.876 Ha. Secara geografis penyebaran tanah sawah di Kabupaten Klungkung terutama di Kecamatan Banjarangkan seluas 2.008 Ha atau 6,57%, di Kecamatan Klungkung seluas 1.264 Ha atau 4,01%, dan di Kecamatan Dawan seluas 612 Ha atau 1,94% dari total luas Kabupaten Klungkung. Sedangkan di Kecamatan Nusa Penida tidak memiliki lahan sawah karena faktor kondisi geografisnya.

2) Tanah Kering

▪ **Pekarangan dan Sekitarnya/Kawasan Permukiman**

Secara keseluruhan penggunaan lahan kawasan permukiman yang merupakan kelompok lahan pekarangan dan sekitarnya, berdasarkan data Tahun 2008 memiliki luas lahan sebesar 1.306 Ha atau 4,12% dari total luas kabupaten. Penggunaan lahan untuk kawasan permukiman yang terbesar adalah di Kecamatan Klungkung yaitu seluas 415 Ha atau 1,32% dari total luas Kabupaten Klungkung. Hal ini disebabkan keberadaan Ibukota Kabupaten Klungkung yaitu Kota Semarapura dengan pemanfaatan lahan kawasan perkotaannya yang intensif berada di Kecamatan Klungkung. Secara fisik kawasan permukiman ini tersebar dalam bentuk kelompok-kelompok kawasan terbangun di sepanjang jalan utama dari arah barat ke timur maupun pada kantong-kantong di sepanjang koridor jalan.

Sedangkan di wilayah Klungkung Kepulauan (Kecamatan Nusa Penida), kawasan pemukiman umumnya tumbuh di sekitar pelabuhan, pusat desa dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Kegiatan permukiman tersebut cenderung berkembang linier di sisi jaringan jalan dan pantai.

▪ **Tegal/Kebun**

Penggunaan lahan untuk tegalan merupakan penggunaan lahan yang cukup besar yaitu sebesar 7.313 Ha atau 24,57% dari total luas wilayah kabupaten. Penggunaan lahan untuk tegalan ini tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan prosentase terbesar terdapat di Kecamatan Nusa Penida yaitu seluas 5.421 Ha atau 17,21% dari total luas Kabupaten Klungkung.

▪ **Hutan Negara**

Kawasan hutan negara hanya terdapat di Kecamatan Nusa Penida yaitu seluas 202 Ha atau 0,64% dari total luas wilayah kabupaten.

▪ **Tanaman Perkebunan**

Penggunaan lahan perkebunan merupakan penggunaan lahan yang cukup mendominasi di Kabupaten Klungkung yaitu seluas 10.060 Ha atau 31,94% dari total luas wilayah kabupaten. Penyebaran lahan perkebunan terdapat hampir disemua kabupaten dengan lahan

perkebunan terluas terdapat di Kecamatan Nusa Penida yaitu seluas 8.070 Ha atau 25,62% dari total luas Kabupaten Klungkung.

- **Hutan Rakyat**

Penggunaan lahan untuk hutan rakyat hanya terdapat di Kecamatan Dawan yaitu seluas 1.082 Ha atau 2,09% dari total luas wilayah kabupaten.

- **Lain-Lain**

Penggunaan lahan untuk kegiatan lain-lain di Kabupaten Klungkung adalah seluas 7.437 Ha (23,61%), dengan penggunaan terbesar ada di Kecamatan Nusa Penida yaitu seluas 6.370 Ha (20,22%).

3) Lahan Lainnya

- **Rawa-Rawa**

Rawa-rawa yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung tidak terlalu besar yaitu seluas 1 Ha atau 0,003% dari total luas wilayah kabupaten dan hanya terdapat di Kecamatan Banjarangkan.

- **Tambak dan Kolam**

Penggunaan lahan untuk kegiatan tambak dan kolam adalah seluas 4 Ha atau 0,013% dari total luas wilayah kabupaten. Penggunaan lahan untuk kegiatan kolam terdapat di Kecamatan Banjarangkan seluas 2 Ha sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan tambak terdapat di Kecamatan Nusa Penida seluas 2 Ha.

Secara lebih terperinci penggunaan lahan di Daerah Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klungkung
Tahun 2004 - 2008 (Ha)

No	Penggunaan Tanah	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Lahan sawah	3.903	3.888	3.873	3.884	3.876
	1.1 Pengairan teknis	-	-	-	-	-
	1.2 Pengairan setengah teknis	3.903	3.888	3.873	3.884	3.876
2.	Lahan Kering	27.592	27.607	27.622	27.611	27.619
	2.1 Pekarangan dan Sekitarnya	1.273	1.279	1.297	1.298	1.306
	2.2 Tegal/ Kebun	7.738	7.738	7.738	7.738	7.313

	2.3 Padang Rumput	-	-	-	-	-
	2.4 Hutan Negara	202	202	202	202	202
	2.5 Perkebunan	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
	2.6 Hutan Rakyat	657	657	657	657	1.082
	2.7 Tanah yang sementara tidak diusahakan	-	-	-	-	-
	2.8 Lain-lain	7.662	7.671	7.668	7.656	7.656
3.	Lahan Lainnya	5	5	5	5	5
	3.9 Rawa-rawa	1	1	1	1	1
	3.10. Tambak	2	2	2	2	2
	3.11. Kolam	2	2	2	2	2
	Jumlah	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Sumber : profil kabupaten klungkung 2009

F. Kondisi Perekonomian Daerah

APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 476.023.838.776,41 (Empat ratus tujuh puluh enam milyar dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh satu sen) terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 288.646.091.546,42 (60,63%)
- Belanja Langsung : Rp. 187.377.747.229,99 (39,37%)

APBD Kabupaten Klungkung dari beberapa Sumber Dana :

- Pendapatan Asli Daerah : - Rp. 23.695.468.265,-
- Dana Perimbangan : - Rp. 349.855.133.723,-
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : - Rp. 41.969.246.000,-
Rp. 415.519.847.988,-
- Belanja : Rp. 476.023.838.776,41
- Defisit : Rp. 60.503.990.788,41

Dari Belanja Langsung Sebesar Rp. 187.377.747.229,99 (39,37%) didistribusikan ke 43 SKPD dengan 977 program/kegiatan sampai Triwulan III realisasi input Rp. 47,362,352,103.36 (25,28%) sedangkan realisasi Output 35.02 %.

1. Perkembangan PAD, DAK dan DAU

Perkembangan PAD, DAK dan DAU di Kabupaten Klungkung dari tahun 2006 sampai tahun 2009 selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan PAD, DAK dan DAU Kabupaten Klungkung
Tahun 2006 - 2009

NO	Uraian	TAHUN (Rp.)			
		2006	2007	2008	2009
1.	PAD	17.468.796.559	18.905.383.996	20.736.127.109,86	27.665.632.068,54
2.	DAK	28.020.000.000	39.472.000.000	47.704.000.000	51.216.000.00
3.	DAU	223.587.000.000	247.321.000.000	276.182.564.000	15.999.899.446,83

Sumber : Selayang Pandang Klungkung 2009

2. PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2009

PDRB dikenal sebagai salah satu Data Statistik yang sangat membantu dalam memberikan gambaran perekonomian suatu daerah dan disajikan secara berkala (series) dari tahun ke tahun serta dirinci menurut lapangan usaha atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan .

PDRB memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. Konsep yang dipakai dalam perhitungan PDRB adalah konsep domestik. Dalam konsep ini seluruh nilai tambah Bruto atau seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha yang melakukan kegiatan di daerah dimasukkan tanpa memperhatikan pemilikan faktor produksi tersebut.

Tabel 2.6
Harga Konstan, Harga Berlaku, Laju Pertumbuhan dan Laju Inflasi PDRB
Kabupaten Klungkung Tahun 2004-2008 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Harga Konstan	Harga Berlaku	Laju Pertumbuhan		Laju Inflasi PDRB
			Harga Konstan	Harga Berlaku	
2004	963.079,87	1.281.627,17	4,67	11,78	6,79
2005	1.015.185,58	1.495.041,45	5,41	16,65	10,66
2006	1.066.284,61	1.643.385,12	5,03	9,92	4,65

2007	1.125.343,88	1.837.631,14	5,54	11,82	5,95
2008	1.182.357,06	2.143.792,34	5,07	16,66	11,04

Sumber : Selayang Pandang Klungkung 2009

3. Komponen PDRB

Didalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung diketahui ada 3 (tiga) sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Klungkung yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi dalam pembentukan struktur perekonomian wilayah Kabupaten Klungkung. Hal tersebut menandakan bahwa corak perekonomian Kabupaten Klungkung masih bertumpu pada sektor agraris dengan dukungan sektor kepariwisataan, jasa-jasa, dan sektor-sektor lainnya.

1. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Klungkung, baik dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Disamping itu, peran sektor pertanian bagi Kabupaten Klungkung sangat strategis dalam hal pertahanan pangan, konservasi dan pelestarian sumber daya alam, memelihara nilai-nilai sosial dan budaya, serta berfungsi sebagai penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi.

1.1 Jumlah Rumah Tangga Petani dan Penggunaan Lahan untuk Pertanian

Hasil sensus pertanian tahun 2003 menunjukkan, jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Klungkung adalah 22.462 KK atau mencapai 60,23% dari jumlah total rumah tangga petani saat itu. Hasil sensus tersebut juga menggambarkan bahwa terdapat 54,61% petani gurem di Kabupaten Klungkung yang terdiri atas 14,75% menguasai lahan lebih kecil dari 10 are dan 39,87% menguasai lahan 10 - 50 are. Walaupun

data penguasaan lahan oleh petani tersebut merupakan sensus tahun 2003, tetapi dapat mewakili kondisi penguasaan lahan saat ini. Bahkan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dengan gerak pembangunan diberbagai sektor maka luas penguasaan lahan oleh petani cenderung semakin menurun, baik karena fragmentasi kepemilikan (bagi waris) maupun karena alih fungsi ke non pertanian.

Tabel 2.7

Jumlah RT Petani dan penggunaan lahan menurut golongan luas lahan yang di kuasai

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Petani (KK)	Luas lahan yang dikuasai (are)			
			< 10	10 - 50	51 - 100	> 100
1.	Nusa Penida	10.678	1.252	1.891	3.571	3.060
2.	Banjarangkan	4.978	472	3.112	1.172	206
3.	Klungkung	3.592	782	2.031	680	93
4.	Dawan	3.214	657	1.518	672	283
Jumlah		22.462	3.163	8.552	6.095	3.642

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

1.2 Mata Pencaharian Penduduk di Sektor Pertanian

Selama lima tahun terakhir dari tahun 2004 - 2008, dari empat kecamatan di Kabupaten Klungkung, Kecamatan Nusa Penida Memiliki jumlah rumah tangga penduduk yang sumber mata pencaharian utamanya di sektor pertanian terbanyak, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Banjarangkan. Bila dilihat perkembangannya diseluruh Kabupaten Klungkung, jumlah rumah tangga penduduk dengan sumber mata pencaharian utama di sektor pertanian cenderung semakin menurun. Pada tahun 2004 berjumlah 17.823 KK turun menjadi 16.904 KK pada tahun 2005. Pada tahun 2006 meningkat sedikit menjadi 17.454 KK tetapi tahun 2007 menurun lagi menjadi sejumlah 17.332 KK. Sektor tanaman pangan merupakan sub sektor pertanian yang paling banyak digeluti oleh penduduk Klungkung, baik di Kecamatan Nusa Penida maupun di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dan Dawan.

Tabel 2.8
Jumlah Rumah Tangga Penduduk Yang Sumber Mata Pencaharian
Utamanya Di Sektor Pertanian Di Kabupaten Klungkung
Tahun 2004 - 2008

No	Mata pencaharian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Tanaman Pangan	13.048	12.225	11.853	28.905	30.886
2.	Perkebunan	1.910	2.344	2.290	2.154	2.136
3.	Peternakan	1.769	3.106	2.834	3.192	2.976
4.	Perikanan	427	485	497	2.303	2.265
Jumlah		17.154	18.160	17.456	36.554	38.263

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Klungkung 2009

1.3 Tanaman Perkebunan

Pembangunan sub-sektor perkebunan di Kabupaten Klungkung seluruhnya dilaksanakan melalui perkebunan rakyat (*public plantation*), yang umumnya merupakan perkebunan campuran. Lima jenis tanaman perkebunan utama di Kabupaten Klungkung dilihat luas areal, produksi, dan jumlah rumah tangga yang membudidayakannya adalah kelapa, jambu mente, kopi, cengkeh dan kakao. Pada tahun 2008, rumah tangga perkebunan kelapa berjumlah 12.683 KK sedangkan untuk jambu mente, kopi, cengkeh dan kakao masing-masing 2.839 KK, 1.572 KK, 2.049 KK dan 231 KK. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelapa tergolong komoditas perkebunan yang paling diminati dilihat dari rumah tangga yang membudidayakannya.

Luas areal tanaman kelapa dan kakao selama periode 2004 -2008 mengalami peningkatan tetapi produksi cenderung menurun. Sedangkan kopi, cengkeh dan jambu mente luas arealnya menurun. Penurunan luas areal yang signifikan adalah paa komoditas jambu mente dimana pada tahun 2004 luasnya 633 Ha menurun menjadi 378 Ha atau menurun sebesar 40,28%. Penurunan luas areal komoditas perkebunan tersebut dari aspek konservasi perlu dicermati karena komoditas perkebunan disamping mempunyai fungsi ekonomi dan sosial, juga tidak kalah pentingnya sebagai pengaturan tata air (*hydrological function*), terlebih-lebih bila dikaitkan dengan keberadaan hutan di Kabupaten Klungkung yang sangat terbatas. Upaya

meningkatkan populasi tanaman jambu mente khususnya pada lahan kritis disatu sisi akan berdampak positif pada konservasi lahan kritis dan disisi lain memberikan dampak ekonomi.

Tabel 2.9

Luas Areal dan Produksi Berbagai Jenis Komoditi Perkebunan di Kabupaten Klungkung tahun 2004-2008

No	Jenis Tanaman	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Kelapa					
	Luas areal (Ha)	2.962	3.061	3.067	3.049	3.048
	Produksi (ton)	3.394	3.318	3.204	3.034	2.904
	Rumah tangga perkebunan kelapa	13.101	12.863	12.863	12.863	12.863
2.	Kopi					
	Luas areal (Ha)	103	83	83	83	83
	Produksi (ton)	93	53	53	41	33
	Rumah tangga perkebunan kopi	2.105	1.572	1.572	1.572	1.572
3.	Cengkeh					
	Luas areal (Ha)	325	356	356	356	312
	Produksi (ton)	85	48	65	119	90
3.	Rumah tangga perkebunan cengkeh	2.241	2.049	2.049	2.049	2.049
4.	Mente					
	Luas areal (Ha)	633	412	412	391	278
	Produksi (ton)	26	18	32	94	27
	Rumah tangga perkebunan mente	3.060	2.839	2.839	2.839	2.839
No.	Jenis Tanaman	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
5.	Kakao					
	Luas areal (Ha)	55	59	61	63	63
	Produksi (ton)	74	71	49	49	53
	Rumah tangga perkebunan kakao	395	229	229	251	231

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

1.4 Kehutanan

Sumber daya hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk berbagai jenis kehidupan. Sumber daya ini merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, serta tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menciptakan iklim mikro daerah sekitarnya. Kabupaten Klungkung memiliki kawasan hutan seluas 1.048,50 Ha (3,33% dari luas wilayah Kabupaten Klungkung) atau 0,19% dari luas wilayah Provinsi Bali dan 0,80% dari luas total hutan Provinsi Bali. Dari 1.048,50 Ha tersebut, seluruhnya berada di Kecamatan Nusa Penida dengan rincian 804,50 Ha merupakan hutan lindung (8.668,24 Ha) dan sisanya 244 Ha adalah hutan produksi (Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2008) dengan luas kawasan hutan sebesar itu maka secara kuantitas masih jauh dibawah luas hutan ideal seperti standar yang ditentukan UU No 41 tahun 1999. Dengan demikian secara kuantitas dan kualitas sangat perlu ditingkatkan, mengingat fungsi sosial ekonomi dan fungsi ekologi hutan sangat penting bagi penyangga kehidupan. Penyebaran kawasan hutan di Kabupaten Klungkung seperti pada Tabel 2.10 sedangkan desa atau dusun yang berbatasan dengan hutan seperti pada Tabel 2.11.

Tabel 2.10
Luas kawasan hutan di Kabupaten Klungkung tahun 2008

No	Kecamatan	RT K	Kawasan hutan	Fungsi hutan				Jumlah
				Hutan Lindung	Cagar Alam	Hutan Wisata	Kebun Raya	
1.	Nusa Penida	22	Nusa	202,00	-	-	-	202,00
		27	Lembongan	-	-	244,00	-	244,00
		28	Tanjung Bakung	329,50	-	-	-	329,50
		29	Suana sakti	273,00	-	-	-	273,00
Jumlah				804,50	0,00	244,00	0,00	1.048,50

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

Tabel 2.11
Desa dan Dusun di Kabupaten Klungkung yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan

No.	RPH	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Dusun	RTK	Fungsi Hutan
1.	Klungkung/ Nusa Penida	Nusa Penida	Pejukutan	Karang Gede	28	Lindung
			Suana	Karangsari	28	Lindung
				Celagi Landan	28	Lindung
				Suana	28	Lindung
			Sekartaji	Ramuan	27	Lindung
				Sedihing	27	Lindung
				Sekartaji	27	Lindung

		Tanglad	Julingan	27	produksi
		Sakti	Penida	29	Lindung
			Sompang	29	Lindung
			Pikat	29	Lindung
		Jungut Batu	Tlaktak	22	Lindung
		lembongan	Lembongan	22	Lindung

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

2. Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Peternakan yang berkembang di wilayah perencanaan merupakan peternakan rakyat yang diusahakan sebagai usaha sampingan atau sebagai pelengkap usaha lainnya, mulai dari skala usaha yang relatif kecil sampai menengah. Ternak yang diusahakan tersebut dapat dibedakan menjadi ternak besar, ternak kecil dan unggas. Pada kelompok ternak besar jenis yang tergolong unggulan adalah sapi, sedangkan pada kelompok ternak kecil yaitu kambing dan babi. Untuk kelompok unggas jenis yang menjadi unggulan adalah ayam dan itik.

Tabel 2.12

Populasi ternak di Kabupaten Klungkung tahun 2004 - 2008

No	Jenis ternak	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Sapi	41.822	43.688	43.943	44.059	44.372
2.	Kambing	775	753	611	632	713
3.	Babi Lokal	23.613	23.532	23.445	19.797	19.362
4.	Babi Sadle Back dan Landrace	16.883	15.759	24.701	15.001	13.382

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

Selama lima tahun terakhir, ayam pedaging dan itik lokal merupakan jenis unggas yang populasinya mengalami peningkatan. Ayam pedaging meningkat dari 223.700 ekor pada tahun 2004 menjadi 301.000 ekor pada tahun 2008, sedangkan itik lokal populasinya meningkat dari 75.637 ekor pada tahun 2004 menjadi 82.370 ekor pada tahun 2008.

Tabel 2.13

Populasi unggas di Kabupaten Klungkung Tahun 2004 - 2008

No	Jenis Unggas	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Ayam Kampung	211.553	211.106	212.440	197.870	193.124
2.	Ayam Pedaging	223.700	279.152	299.100	295.735	301.000
3.	Itik Lokal	75.637	58.895	51.988	73.218	82.370
4.	Itik Manila	1.533	1.147	1.009	944	824
5.	Itik Kaki Campbell	7.643	6.226	6.193	3.973	4.348

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

Pembangunan perikanan yang ada dan berkembang di Kabupaten Klungkung adalah perikanan budidaya, meliputi pemeliharaan ikan dikolam air tenang, saluran irigasi, sawah dan sungai. Disamping itu berkembang pula perikanan tangkap yaitu kegiatan penangkapan ikan atau hewan air lainnya dilaut yang sangat berpotensi dikembangkan di Kecamatan Nusa Penida dan Dawan. Kontribusi sub-sektor ini tidak kalah pentingnya dengan sub-sektor lainnya.

Jumlah rumah tangga yang mata pencahariannya dari perikanan laut mengalami peningkatan dari 3.397 KK pada tahun 2004 menjadi 4.142 KK pada tahun 2007, tetapi pada tahun 2008 menurun menjadi 4.118 KK. Secara umum perkembangan perikanan laut di Kabupaten Klungkung tergolong kurang mengembirakan baik dilihat dari jumlah perahu penangkap ikan, alat penangkap ikan maupun produksinya. Perahu penangkap ikan jumlahnya bertambah dari 494 unit pada tahun 2004 menjadi 2.339 unit pada tahun 2006 tetapi pada tahun 2008 jumlahnya menurun kembali sangat drastis menjadi 1.065 unit. Demikian pula halnya dengan perkembangan alat penangkap ikan, produksi ikan laut dan produksi rumput laut.

Tabel 2.14
Indikator perikanan laut di Kabupaten Klungkung
Tahun 2004 - 2008

No	Uraian	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Rumah tangga perikanan (KK)	3.379	3.795	3.803	4.142	4.118
2.	Perahu penangkap ikan (unit)	949	950	2.399	1.079	1.065
3.	Alat penangkap ikan (unit)	2.361	2.411	2.384	2,158	2.130
4.	Produksi ikan laut (ton)	2.455	2.455	2.137	2.394	2.168
5.	Produksi rumput laut (ton)	103.834	103.834	106.188	91.320	101.210

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

3. Penggalian dan Pertambangan

Selama ini Kabupaten Klungkung memperoleh hasil penggalian dan pertambangan dari galian golongan C berupa pasir dan batu yang terdapat di Gunaksa, Kecamatan Dawan, serta dari Kecamatan Klungkung yaitu Jumpai dan Tangkas, namun dalam jumlah yang kecil. Bentang alam

lingkungan galian C yang berlokasi di Gunaksa sudah berada dilevel permukaan laut. Kondisi tersebut mendasari adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang dicerminkan dengan diterbitkannya Intruksi Bupati Klungkung Nomer 3 tahun 2002 tentang Penghentian Penggunaan Alat-alat Berat dalam Penambangan Bahan Galian C diatas desa Gunaksa, Tangkas, Jumpai dan sekitarnya.

Kegiatan penambangan, terutama tambang rakyat walaupun secara legal formal sudah dihentikan aktifitasnya di beberapa lokasi diatas, namun jenis penambang galian C masih cukup banyak dilakukan dengan status tidak terdaftar, sehingga sulit untuk diketahui dengan pasti tentang jumlah, jenis penambang maupun lokasinya. Berkaitan dengan hal tersebut maka, Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan berkewajiban memberikan masukan terutama kepada pemerintah daerah mengenai pengolahan lahan pasca penambangan dengan cara melakukan kegiatan pada setiap lokasi.

Potensi bahan tambang di Provinsi Bali terdiri dari batu gamping (batu kapur), batu apung, batu permata, batu paras, batu andesit, batu pilah, batu tabas, batu lahar (batu barak), tanah liat, tanah urung dan sirtu. Potensi berbagai jenis sumber daya mineral tersebut hingga saat ini belum seharusnya ditambang. Adapun yang telah dikelola dan dimanfaatkan terutama adalah sirtu dan batu gamping. Penggalian batu paras, batu tabas, batu andesit, batu kapur dan sirtu yang dilakukan didaerah perbukitan maupun daratan rendah pada umumnya telah menimbulkan dampak negatif berupa rusaknya bentang alam yang takberaturan, seperti terbentuknya lubang-lubang yang tergenang air, tebing-tebing curam dan terjal, serta timbulnya tanah penutup yang berserakan.

Berdasarkan data Master Plan Penunjang Inventasi Provinsi Bali tahun 2006 - 2010, di Kabupaten Klungkung disebutkan terdapat 125 lokasi kegiatan penggalian sirtu dengan nilai LQ sebesar 1,37. Namun demikian jumlah lokasi yang sedemikian banyak hanya terkonsentrasi di suatu tempat saja, yaitu didaerah desa Gunaksa dan desa Tangkas, sehingga luas penggalian sirtu secara keseluruhan mencapai hampir 300 Ha. Lokasi penggalian yang sedemikian luas ini, karena diusahakan oleh tambang rakyat yang tidak

mengindahkan teknik penggalian yang baik dan benar, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Tabel 2.15
Hasil Perhitungan LQ Sektor Penggalian Provinsi Bali Tahun 2005

No	Kabupaten/ Kota	Batu Kapur	Batu Adesit	Batu Tabas	Sirtu	Tanah Urung	Batu Apung	Tanah Liat
1.	Klungkung	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
2.	Jembrana	0,00	0,00	0,00	1,28	0,06	0,00	2,02
3.	Tabanan	0,00	45,79	0,00	0,05	0,00	0,00	31,03
4.	Badung	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
5.	Denpasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
6.	Gianyar	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	9,93
7.	Bangli	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00
8.	Karangasem	0,00	0,00	3,21	1,36	0,00	0,00	0,5
9.	Buleleng	0,09	32,65	0,00	0,77	7,91	88,89	4,66

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

4. Industri

Perkembangan sektor industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari sektor formal maupun informal. Di sektor formal terjadi peningkatan unit usaha dari tahun 2004 ke 2008 sebesar 16,72% dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 20,15%. Penyebaran industri formal pada tahun 2008 di Kecamatan Klungkung sebesar 64,07%, Dawan 19,35%, Banjarangkan 15,58%, dan Nusa Penida 1,01%.

Tabel 2.16
Data Kumulatif Industri tahun 2004 - 2008

No	Tahun	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	2004	Formal	341	3.549
		Informal	4.923	11.797
		Jumlah	5.264	15.346
2.	2005	Formal	354	3.711
		Informal	4.959	11.911
		Jumlah	5.313	15.622
3.	2006	Formal	363	3.704
		Informal	5.024	15.823
		Jumlah	5.387	19.527
4.	2007	Formal	381	4.042
		Informal	5.172	12.751
		Jumlah	5.553	16.793
5.	2008	Formal	398	4.264
		Informal	5.201	12.239
		Jumlah	5.599	16.503

5. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Klungkung mempunyai andil yang cukup besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Klungkung. Sektor ini berpengaruh signifikan bagi perkembangan sektor-sektor lainnya dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten sebesar 20,81%. Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Klungkung tahun ke tahun mengalami peningkatan baik disektor formal maupun informal. Disektor formal terjadi peningkatan unit usaha dari tahun 2004 ke 2008 sebesar 42,31% dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 39,31%. Realisasi nilai ekspor baik langsung maupun lewat pihak ketiga tahun 2006 dan tahun 2007 mengalami peningkatan dengan nilai Rp. 3.124.122.000,- atau naik sebesar 26,97%. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 (sampai dengan triwulan ke III) mengalami penurunan sebesar 18,68% hal ini merupakan cermin dari dampak krisis global.

Tabel 2.17

Data Kumulatif Perdagangan Tahun 2004 - 2008

No	Tahun	Jenis Dagang	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1.	2004	Formal	1.522	3.923
		Informal	5.610	6.590
		Jumlah	7.132	10.513
2.	2005	Formal	1.618	4.211
		Informal	5.675	6.665
		Jumlah	7.293	10.876
3.	2006	Formal	1.941	4.857
		Informal	5.740	6.732
		Jumlah	7.681	11.589
4.	2007	Formal	2.045	5.125
		Informal	5.802	6.807
		Jumlah	7.847	11.932
5.	2008	Formal	2.166	5.465
		Informal	6.433	7.890
		Jumlah	8.599	13.355

Sumber: Profil Kabupaten Klungkung 2009

6. Listrik dan Air Minum

Listrik dan air minum merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Klungkung. Peran dan kontribusi bidang kelistrikan dan air minum sangat diperlukan untuk menunjang tumbuh dan berkembangnya kegiatan berbagai sektor ekonomi dan jasa.

6.1 Listrik

Seiring dengan meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat, fasilitas listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama sebagai sumber penerangan tempat tinggal. Kelengkapan fasilitas listrik akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Pada tahun 2007 rumah tangga di Kabupaten Klungkung yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama dirumahnya mencapai 93,02%, sedangkan sisanya menggunakan sumber penerangan pelita/sentir/obor yaitu sebesar 6,98%. Dengan demikian rumah tangga yang sumber penerangan rumahnya dari bukan listrik masih relatif tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dari pihak terkait untuk penanganannya. Produksi listrik di Bali pada umumnya dan di Kabupaten Klungkung khususnya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan suplai dari sistem listrik Jawa-Bali. Seluruh desa di Kabupaten Klungkung sudah mendapat aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan jumlah gardu sebanyak 181 buah. Pada tahun 2008 jumlah pelanggan mencapai 32.465 orang/badan, meningkat sekitar 1,53% dibanding tahun 2007 dan peningkatan daya sebesar 4,69%. Terdapat juga sumber listrik dengan menggunakan tenaga matahari dan tenaga angin di Nusa Penida.

Tabel 2.18
Jumlah Pelanggan dan Daya Listrik

No	Tarif	2006		2007		2008	
		Pelanggan	Daya (VA)	Pelanggan	Daya (VA)	Pelanggan	Daya (VA)
1.	S	1.387	1.251.550	1.435	1.367.600	1.461	1.436.450
2.	R	28.082	17.928.300	28.833	18.880.150	29.069	19.369.000
3.	B	1.264	4.017.600	1.311	4.456.100	1.508	4.925.400
4.	I	6	104.500	5	100.100	5	100.100
5.	P	339	1.412.210	372	1.643.660	422	1.859.200
Jumlah		31.078	24.714.160	31.976	26.447.610	32.465	27.690.150

Keterangan : S = sosial R = Rumah Tangga B= Bisnis I = Industri P = Publik

Sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009

6.2 Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia terutama untuk keperluan minum dan masak. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Klungkung mempunyai air minum

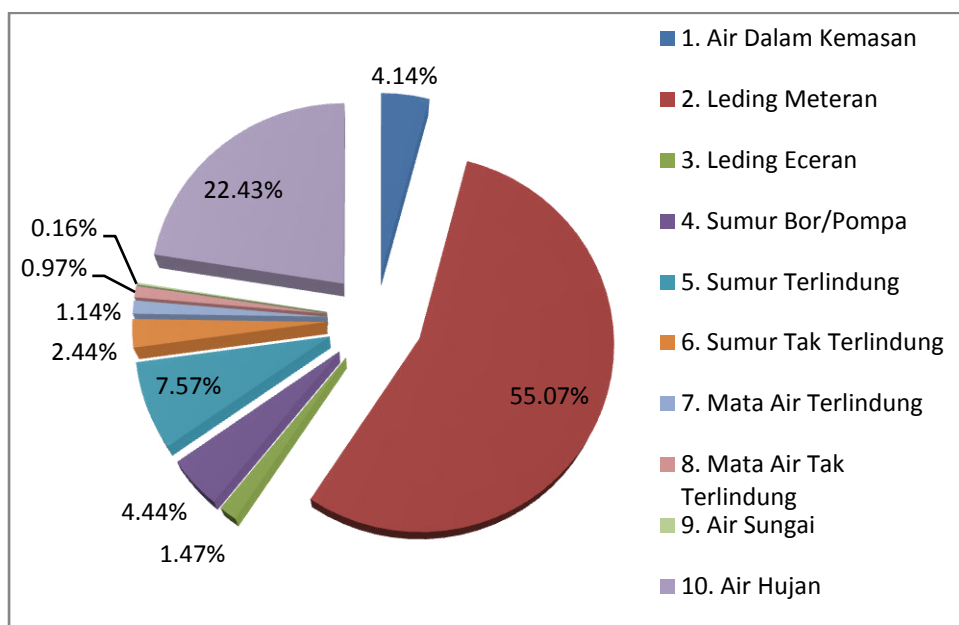
sendiri (69,61%) sedangkan sebesar 26,94% menggunakan fasilitas air minum bersama, 3,28% menggunakan fasilitas umum dan 0,17% belum mempunyai fasilitas air minum. Jumlah pelanggan air minum di Kabupaten Klungkung lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah pelanggan mencapai 19.175 orang/usaha meningkat sebesar 19,91%. Jumlah pelanggan tersebar di empat Kecamatan seperti tersaji dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Jumlah Pelanggan Air Minum Kabupaten Klungkung
Tahun 2004 - 2008

Tahun	Jumlah Pelanggan di Kecamatan				Total
	Banjarangkan	Klungkung	Dawan	Nusa Penida	
2004	3.021	10.216	2.806	1.268	17.311
2005	3.170	10.595	2.914	1.400	18.079
2006	3.230	10.907	2.978	1.444	18.595
2007	3.245	11.152	2.974	1.445	18.816
2008	3.330	11.432	2.968	1.445	19.175

Sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009

Secara umum rumah tangga di Kabupaten Klungkung telah menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, dimana sekitar 76,27% telah menggunakan air bersih/sehat atau air yang bersumber dari air kemasan (4,14%), air leding (56,54%), pompa (4,44%), sumur terlindung (7,57%) dan mata air terlindung (1,14%). Namun demikian masih terdapat 23,73% rumah tangga yang sumber airnya minimum tingkat kebersihan atau kesehatannya masih perlu dipertanyakan karena berpengaruh besar terhadap kesehatan penduduk. Sumber air yang tingkat kebersihan /kesehatannya dipertanyakan tersebut terdiri atas mata tidak terlindung (0,97%), air sungai (0,16%), air hujan (22,43%). Masih tingginya sumber air minum dari air hujan di Kabupaten Klungkung merupakan kontribusi dari Kecamatan Nusa Penida yang memang kondisi geografisnya masih sangat tergantung dari air hujan (dengan menggunakan cubang dan embung untuk menampung air hujan tersebut).



Grafik 2.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Klungkung (sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009)

4. Kemiskinan dan Desa Tertinggal

Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya kurang dari satu dolar/orang per hari atau penduduk yang pendapatannya kurang dari 2.100 kilo kalori per orang/hari (BPS, 1998). Untuk itu, salah satu sarana pembangunan adalah dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, di Kabupaten Klungkung persentase penduduk miskin adalah sebesar 18,36%, kemudian pada tahun 2008 persentase penduduk miskin telah dapat diturunkan menjadi 17,12%. Bila dilihat sebaran penduduk miskin per Kecamatan, Kecamatan Dawan merupakan Kecamatan dengan persentase penduduk miskin terkecil di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar 11,38% kemudian diikuti oleh Kecamatan Banjarangkan dengan posisi penduduk miskin terkecil kedua yaitu 11,98%. Kecamatan Klungkung sebagai pusat ibukota Kabupaten Klungkung memiliki persentase penduduk miskin lebih banyak dibandingkan Kecamatan Dawan dan Banjarangkan yaitu sebesar 13,14%. Namun demikian, persentase penduduk miskin tertinggi adalah di Kecamatan Nusa Penida yaitu sebesar 31,98%, dengan kata lain diantara tiga penduduk di Kecamatan Nusa Penida terdapat satu penduduk miskin. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nusa Penida merupakan penyumbang hampir sebagian penduduk miskin di Kabupaten

Klungkung. Hal ini terkait dengan kondisi geografis Kecamatan Nusa Penida yang identik dengan keseragaman dan daerah tandus, wilayah dengan kelerengan tinggi, curam dan berbatu-batu, curah hujan yang rendah, keterbatasan tumbuhnya tanaman pangan termasuk tidak adanya produksi beras, dan keberadaan Nusa Penida yang dipisah oleh perairan/laut yang memberi dampak pada keterbatasan akses sibilitas dan keterisolasian dibanding dengan Kecamatan-kecamatan lainnya. Semua hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap aspek sosial ekonomi dan budaya penduduk seperti pendidikan, kesehatan ketahanan pangan dan sebagainya yang secara keseluruhan merupakan satu resultante dari faktor-faktor penyebab kemiskinan.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan Di Kabupaten Klungkung
Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1.	Nusa Penida	15172	47448	31.98
2.	Banjarangkan	4678	39037	11.98
3.	Klungkung	7112	54111	13.14
4.	Dawan	4122	36226	11.38
Kabupaten Klungkung		31084	176822	17.12

Sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009

Pada tahun 2007 desa tertinggal di Kabupaten Klungkung tercatat sebanyak 18 desa, 7 desa diantaranya berada di perkotaan dan 11 desa berada di pedesaan. Kecamatan Nusa Penida memiliki desa tertinggal terbanyak yaitu 12 Desa (2 desa perkotaan dan 10 desa pedesaan), Kecamatan Dawan memiliki 5 desa tertinggal (1 desa perkotaan dan 4 desa pedesaan), Kecamatan Klungkung memiliki 1 desa tertinggal, sedangkan Kecamatan Banjarangkan merupakan satu-satunya Kecamatan yang tidak memiliki desa tertinggal.

Tabel 2.21
Jumlah Dan Sebaran Desa Tertinggal Di Kabupaten Klungkung
Tahun 2007

No.	Kecamatan	Nama Desa Tertinggal	
		Perkotaan	Pedesaan
1.	Nusa Penida	1. Batununggul 2. Toye Pakeh	1. Bunga Mekar 2. Klumpu 3. Tanglad 4. Sekartaji 5. Batumadeg 6. Batukandik 7. Suana 8. Pejukutan 9. Sakti 10. Kutampi Kaler
2.	Dawan	1. Kusamba 2. Sulang 3. Gunaksa 4. Paksewali	1. Besan
3.	Klungkung	1. Satra	
Jumlah		7	11

Sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009

G. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan, karena penduduk itu sendiri berperan penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2008 berjumlah 176.822 jiwa.

Penyebaran penduduk tidak merata di empat kecamatan, yaitu 73,17% berada di daratan Klungkung (Banjarangkan, Dawan dan Klungkung), sedangkan sisanya 26,83% berada di Kepulauan Nusa Penida (Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan). Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Nusa Penida 47.448 jiwa, Kecamatan Banjarangkan 39.037 jiwa, Kecamatan Klungkung 54.111 jiwa dan Kecamatan Dawan 36.226 jiwa. Dengan demikian terdapat ketimpangan kepadatan penduduk di empat kecamatan, kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kecamatan Nusa Penida 234 jiwa, Kecamatan Banjarangkan 854 jiwa, Kecamatan Klungkung 1.863 jiwa dan Kecamatan Dawan 969 jiwa. Jumlah kepala keluarga setiap tahun

bertambah dan pada tahun 2008 berjumlah 45.312 KK dengan rata-rata anggota rumah tangga 4 orang per KK.

Perkembangan jumlah penduduk di kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,822% per tahun. Perkembangan penduduk tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 disajikan dalam Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Klungkung
Tahun 2004 - 2008

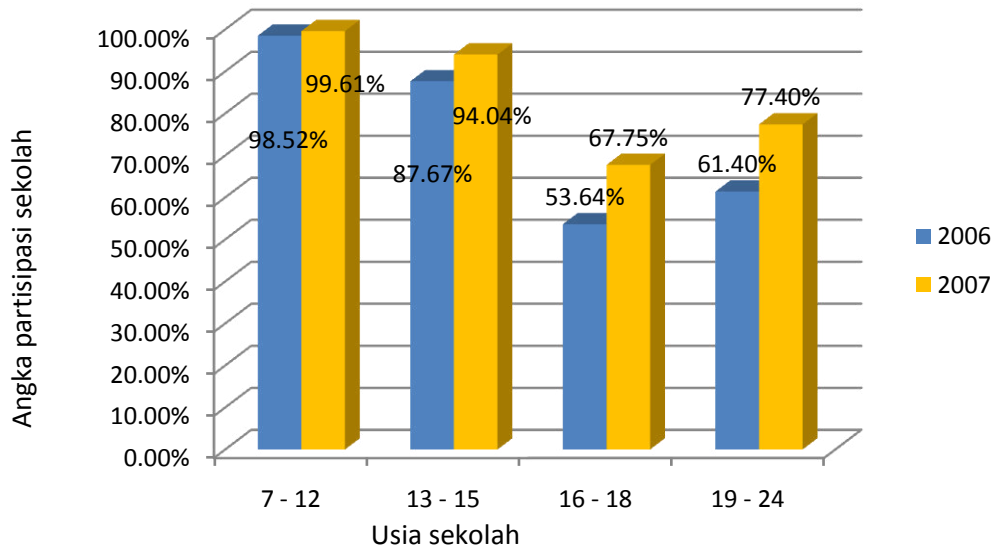
No	Penduduk	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Laki-laki	82.811	83.468	84.422	86.156	86.849
2	Perempuan	87.211	87.276	88.091	89.274	89.973
	Jumlah	170.092	170.744	172.513	175.430	176.822

Sumber : Klungkung dalam Angka 2008

2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk dapat di lihat melalui tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat. Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong penduduk ikut serta berpartisipasi dalam proses kegiatan pembangunan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan salah satunya dapat di tunjukkan dari seberapa banyak penduduk yang bersekolah melalui angka partisipasi sekolah (APS).

APS penduduk di Kabupaten Klungkung pada setiap jenjang pendidikan selama dua tahun terakhir (2006-2007) mengalami kenaikan yang signifikan. Partisipasi sekolah penduduk usia 7- 12 tahun (usia sekolah dasar) naik dari 98,52% menjadi 99,61%, penduduk usia 13-15 tahun (usia SMP) naik dari 87,67% menjadi 94,94%, penduduk usia 16-18 tahun (usia SMA) naik dari 53,64% menjadi 67,75%, dan usia 19-24 tahun (usia PT) naik dari 6,14% menjadi 7,74% Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.2 Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7 Tahun Keatas Menurut Usia Sekolah (Sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009)

IPM Sebagai indikator pencapaian pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung merupakan titik sentral dari seluruh program pembangunan juga merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi, serta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor pembangunan. Perkembangan IPM dan penyusunnya pada tahun 2006 – 2008 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.23
IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2006 - 2008**

Uraian	Tahun		
	2006	2007	2008
Indeks Kesehatan	0,73	0,73	-
Indeks Pendidikan	0,69	0,69	-
Indeks Pendapatan	0,64	0,65	-
IPM	68,72	68,89	69,66

Sumber : Selayang Pandang Klungkung 2009

**Tabel 2.24
Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah**

Uraian	Tahun		
	2006	2007	2008
Angka Harapan Hidup	68,93	68,80	69,00
Angka Melek Huruf	78,06	80,00	80,98

Rata-rata lama Sekolah	6,14	6,90	7,02
------------------------	------	------	------

Sumber : Selayang Pandang Klungkung 2009

Pendidikan anak usia dini (PAUD) di tujukan untuk menyiapkan anak pra sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan perkembangan jiwanya, sehingga setiap anak usia sekolah yang akan mengikuti pendidikan dasar telah dilatih kemampuan mentalnya untuk mengikuti kurikulum pendidikan yang sesuai dengan usianya. Hingga tahun 2008 jumlah tempat penitipan anak dan kelompok bermain berjumlah 2 (dua) buah. Sedangkan jumlah anak-anak yang mengikuti program PAUD dari tahun 2004 hingga tahun 2008 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 jumlah anak-anak yang mengikuti program PAUD berjumlah 2.420 siswa, pada tahun 2005 sebanyak 2.496 siswa, pada tahun 2006 meningkat menjadi 2.513 siswa, pada tahun 2007 sebanyak 2.536 siswa dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 2.660 siswa.

Capaian angka partisipasi menunjukkan semakin membaiknya pengembangan SDM di suatu daerah, oleh karenanya capaian angka partisipasi ini wajib terus di kembangkan agar mencapai hasil yang lebih maksimal untuk kemajuan pembangunan daerah. Untuk capaian angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Klungkung menunjukkan kondisi yang semakin meningkat baik untuk pendidikan sekolah dasar, tingkat SMP, maupun SMA/K. Adapun untuk lebih rincinya nilai angka partisipasi kasar (APK) adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Kabupaten Klungkung

No	Tingkat Pendidikan	Capaian Angka Partisipasi Kasar (%)				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Sekolah dasar (SD)	106,23	107,74	107,39	109,76	108,41
2	SMP	93,00	93,09	93,31	94,01	99,48
3	SMA	65,00	65,15	67,25	69,08	77,22

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

Pendidikan non formal di Kabupaten Klungkung dari tahun 2004 - 2008 sudah mengalami perkembangan. Hal itu dapat dilihat dari terselenggaranya

pelatihan bagi para tutor, baik pelatihan paket A, pelatihan paket B dan pelatihan paket C. Pada tahun 2004 dan 2005 pelatihan ini belum diadakan, dan pada tahun 2006 - 2008 jumlah tutor yang mendapat pelatihan paket A sebanyak 6 orang, jumlah tutor yang mendapat pelatihan paket B sebanyak 170 orang dan jumlah tutor yang mendapat pelatihan paket C sebanyak 51 orang. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut.

Tabel 2.26

Jumlah tutor yang mendapatkan pelatihan paket A, paket B dan paket C di Kabupaten Klungkung tahun 2004 - 2008

No	Uraian	Jumlah tutor yang mendapat pelatihan				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Pelatihan paket A	-	-	6	6	6
2	Pelatihan paket B	-	-	170	170	170
3	Pelatihan paket C	-	-	51	51	51

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

Dalam upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta tenaga pendidik di Kabupaten Klungkung dilakukan pelatihan-pelatihan khusus seperti pelatihan kualifikasi bagi para guru, dimana pada tahun 2006 jumlah guru yang mendapatkan pelatihan kualifikasi sebanyak 30 orang, di tahun 2007 sebanyak 149 orang dan pada tahun 2008 guru yang mendapatkan pelatihan kualifikasi sebanyak 236 orang. Persentase guru yang mendapatkan pelatihan muatan lokal dari tahun 2006 sebanyak 2%, pada tahun 2007 meningkat menjadi 5% dan di tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 3%. Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan informasi manajemen pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2005 guru yang mendapatkan pelatihan informasi manajemen pendidikan sebanyak 100 orang, ditahun 2006 meningkat menjadi 200 orang, pada tahun 2007 sebanyak 160 orang dan pada tahun 2008 guru yang mendapatkan pelatihan informasi manajemen pendidikan sebanyak 240 orang. Sedangkan jumlah perangkat keras SIMP (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2004 jumlah perangkat keras SIMP berjumlah 15 unit, tahun 2006 berjumlah 20 unit, tahun 2006 berjumlah 30 unit, tahun 2007 berjumlah 38 unit dan pada tahun 2008 berjumlah 48 unit. Selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Klungkung juga dilakukan sistem penilaian/evaluasi komprehensif yang dilakukan 2 kali setiap tahunnya.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan dapat dilihat tingkat pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Klungkung. Di Kabupaten Klungkung terdapat 2 unit Rumah Sakit Umum yang terletak di ibukota kabupaten yaitu RSUD dan RSUD Bintang, 9 (sembilan) Puskesmas, 53 Puskesmas Pembantu dan 17 Puskesmas Keliling yang tersebar di empat kecamatan. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berupa penyediaan ruang rawat inap dengan jumlah kamar sebanyak 64 buah dan 106 tempat tidur. Jenis pelayanannya adalah penyakit bedah, kebidanan, umum, kesehatan ibu dan anak, ruang perinatologi serta penyakit dalam, dan tersedia pula ruang Paviliun Semara Husada lantai II dan III masing-masing tersedia 9 kamar tidur dan 9 tempat tidur. RSUD Bintang menyediakan ruang rawat inap dengan jumlah tempat tidur 50 buah. Untuk pelayanan kesehatan sampai pada tingkat kecamatan dan desa, kelengkapan fasilitas puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling maupun praktek dokter sudah cukup merata. Sehingga masyarakat yang aksesibilitasnya jauh dengan Rumah Sakit dapat memanfaatkan pelayanan puskesmas setempat.

Jika dilihat dari aspek-aspek tersebut diatas, maka bisa dikatakan bahwa kualitas masyarakat Kabupaten Klungkung sudah cukup memadai jika dilihat dari tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan, dimana jumlah keluarga yang tergolong miskin tidak terlalu besar jumlahnya. Sedangkan dari tingkat pendidikan kualitas masyarakat bisa dikatakan masih rendah dengan masih banyaknya penduduk yang belum pernah sekolah dan tamatan SD. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Klungkung, pemerintah perlu meningkatkan pengadaan fasilitas-fasilitas publik dengan penyebaran yang lebih merata dan memotivasi penduduk untuk meningkatkan tingkat pendidikan agar penduduk memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

H. Sistem Transportasi

1. Transportasi Darat

a) Kondisi, Status dan Fungsi Jalan

Jalan merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan lalu lintas. Kondisi jalan yang baik akan sangat membantu kelancaran arus lalu lintas angkutan darat. Menurut statusnya jalan dapat dibedakan menjadi

Jalan Negara/Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Sedangkan menurut fungsinya, jalan dapat dibedakan menjadi Arteri primer, Kolektor, Lokal primer, dan lokal. Panjang jalan menurut fungsinya pada tahun 2008 adalah jalan arteri primer 17,4 km, kolektor provinsi 12,240 km, lokal desa 303,690 km, dimana jalan dengan kondisi baik 58,400 km, kondisi sedang 18,320 dan kondisi rusak 226,970 km dan jalan lokal primer kabupaten 463,620 km dimana jalan dengan kondisi baik 229,739 km, kondisi sedang 106,122 km dan kondisi rusak 127,759 km, dan panjang jalan seluruhnya untuk di Kabupaten Klungkung tahun 2004 s/d 2008 disajikan pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27
Panjang jalan Kabupaten Klungkung Tahun 2004 - 2008

Jalan	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008
Panjang jalan (Km)	584,056	588,156	588,159	588,156	796,950

Sumber : Klungkung dalam Angka 2009

Fungsi jaringan jalan yang ada di Kabupaten Klungkung mencakup jalan arteri adalah ruas Jalur Denpasar (Tohpati) - Gianyar - Semarapura - Padangbai (sebelah utara), Denpasar (Tohpati) - Kusamba (Sunrise Road) - Padangbai (sepanjang pantai), jalan kolektor adalah ruas Jalur Gelgel - Semarapura - Rendang, Jalur Sedayu - Takmung, Jalur Klotok - Semarapura, Jalur Pakseballi - Muncan - Rendang dan jalan lokal adalah ruas jalan lainnya dalam sistem jaringan primer.

Sedangkan kondisi prasarana transportasi di wilayah Klungkung Kepulauan pada umumnya telah dapat menjangkau atau menghubungkan seluruh desa yang ada. Prasarana perhubungan darat merupakan pengangkutan yang paling umum digunakan di dalam Pulau Nusa Penida. Jalan-jalan yang ada saat ini boleh dikatakan sudah relatif baik, terutama jalan-jalan utama dengan lebar jalan 4 m, penghubung antar desa sudah di buat perkerasan aspal yang memiliki lebar 3,50 m, sedangkan sebagian kecil saja untuk jalan kecil dipinggir desa masih berupa perkerasan makadam dan jalan tanah.

b) Terminal

Terminal yang ada di Kabupaten Klungkung meliputi : Terminal Semarapura (Klungkung Daratan) dan Terminal di Sampalan (Nusa Penida). Terminal Semarapura berfungsi sebagai terminal antar kota dan sub kota, sedangkan Terminal di Sampalan berfungsi sebagai terminal lokal (tempat mangkal angkutan umum). Daya dukung terminal dicerminkan oleh karakteristik terminal baik lokasi, luas, kapasitas dan pertumbuhan kedatangan kendaraan dan penumpang.

Kondisi Terminal Semarapura relatif masih baik namun dari kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan seperti peningkatan kapasitas tempat parkir, ruang tunggu, dan fasilitas WC.

Sedangkan kondisi terminal di Sampalan relatif kurang baik, oleh karena itu di masa mendatang perlu dipersiapkan sarana angkutan dan terminal/shelter yang khusus melayani wisatawan, mengingat Nusa Penida merupakan kawasan pariwisata.

c) Moda Angkutan

Moda angkutan yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Klungkung, diklasifikasikan mobil penumpang (Mini Bus, pick up, truk dan bus), Sedan, jeep serta sepeda motor. Berdasarkan data Klungkung Dalam Angka Tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Klungkung sebanyak 44.902 unit dengan jumlah terbanyak berupa sepeda motor sebanyak 40.136 unit, Minibus sebanyak 2.040 unit, pick up sebanyak 1.240 unit, truk sebanyak 617 unit, bus sebanyak 66 unit, sedan 331 unit, dan jeep sebanyak 472 unit. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 2.28 berikut

Tabel 2.28
Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Tahun 2004 - 2008

No	Jenis Kendaraan	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Sedan	325	338	344	324	331
2	Jeep	419	426	460	467	472
3	Minibus	1.578	1.726	1.767	1.856	2.040
4	Bus	69	78	72	66	66

5	Pick Up	1.058	1.113	1.156	1.160	1.240
6	Truck	475	499	513	541	617
7	Sepeda Motor	27.121	32.443	34.535	36.696	40.136
Jumlah		31.045	36.623	38.847	41.110	44.902

Sumber : Klungkung dalam Angka 2009

Untuk wilayah Klungkung Kepulauan (Kecamatan Nusa Penida), untuk kegiatan transportasi di dalam pulau sendiri, masyarakat umumnya menggunakan kendaraan pribadi yang berupa sepeda motor dan sebagian kecil menggunakan mobil, yang lain kebanyakan menggunakan angkutan umum yang berupa truck dan mobil pick up yang dimodifikasi untuk angkutan penumpang (Angguna) dengan kapasitas 11 penumpang. Angkutan umum tersebut merupakan angkutan pedesaan yang melayani rute dan waktu operasi yang relatif terbatas, yaitu dari pelabuhan ke desa-desa/banjar dan antar desa.

2. Prasarana Transportasi Laut

a) Klungkung Daratan

Di wilayah Klungkung daratan terdapat pelabuhan rakyat barang/jasa Kusamba. Pelabuhan ini memiliki fasilitas kantor untuk mengatur keberangkatan dan kedatangan armada angkutan penyeberangan Buyuk Nusa Penida. Jenis armada angkutan yang dilayani adalah jenis armada angkutan tradisional dengan mesin tempel dengan ukuran yang relatif kecil. Tempat penyeberangan ini belum dilengkapi dermaga/jeti karena pada umumnya jenis armada angkutan dengan ukuran kecil dapat langsung merapat di pantai. Namun kondisi ombak di Pantai Kusamba pada umumnya cukup besar sehingga menyulitkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang/barang.

b) Klungkung Kepulauan

Pelayanan angkutan laut ke dan dari Nusa Penida umumnya menggunakan perahu motor tempel, *speedboat* atau menggunakan kapal ro-ro yang baru beroperasi pada bulan Oktober Tahun 2006.

Pelayanan angkutan laut dari Padang Bai dan Kusamba ke Nusa Penida sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Arus gelombang laut yang cukup

kuat akan membatasi waktu operasi kapal jenis motor tempel dan *speedboat*.

Pelabuhan di Bali daratan yang melayani perjalanan ke Nusa Penida adalah pelabuhan rakyat tradisional Banjar Bias, Banjar Tribuana dan Kusamba di Kabupaten Klungkung serta Pelabuhan Padang Bai di Karangasem dan Pelabuhan Wisata Benoa dan Sanur di Kota Denpasar.

Rata-rata lama penyeberangan adalah sekitar 1,5 (satu setengah) jam, sedangkan dari Pantai Sanur diperlukan waktu lebih lama, yakni sekitar 2 (dua) jam. Melalui Pantai Sanur, biasanya sarana yang ada berupa Jukung (perahu) bermotor tersedia hampir setiap waktu, dengan kapasitas muatan rata-rata antara 30 sampai 60 orang. Sedangkan jukung yang berukuran besar berkapasitas sampai dengan 120 orang.

Di Nusa Penida sendiri terdapat beberapa pelabuhan rakyat yaitu Kutampi/Buyuk, Toyapakeh, Banjar Nyuh, Ped, Tanjung Sanghyang, Jungutbatu dan Pelabuhan Nusa Penida.

a. Pelabuhan Nusa Penida

Pelabuhan ini masih tergolong baru namun dalam segi fungsi sangat strategis karena di pelabuhan ini kapal ro-ro beroperasi (Oktober 2006) dan menyebabkan aksesibilitas dari dan ke Nusa Penida semakin terbuka dan lancar.

b. Pelabuhan Kutampi/Buyuk

Pelabuhan ini telah dilengkapi kantor untuk mengatur keberangkatan dan kedatangan armada angkutan. Telah memiliki fasilitas sandar/jeti dari kayu terutama dimanfaatkan pada saat air laut pasang. Melayani rute Buyuk - Kusamba dan Buyuk - Padangbai. Rute Buyuk - Padangbai ini menggunakan armada yang lebih modern yaitu menggunakan armada boat *fiber glass* dengan kecepatan relatif tinggi dibandingkan dengan perahu tempel.

c. Pelabuhan Toyapakeh dan Banjar Nyuh

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tradisional/rakyat.

d. Dermaga Ped

Dermaga ini cukup permanen dengan konstruksi beton namun perahu tradisional tidak dapat memanfaatkan dermaga ini karena

arus pada lokasi ini cukup kuat. Dermaga ini dimanfaatkan bagi armada angkutan wisata laut yang datang dari Pelabuhan Benoa.

e. Pelabuhan Tanjung Sanghyang dan Jungutbatu

Kedua pelabuhan ini merupakan pelabuhan wisata. Pelabuhan Jungutbatu berfungsi untuk melayani angkutan dari dan ke Sanur bagi penduduk lokal maupun wisatawan. Armada angkutannya juga menggunakan perahu tempel dan belum dilengkapi dermaga. Tempat penyeberangan ini lokasinya pada pantai yang relatif dangkal sehingga waktu air surut menyulitkan bagi armada untuk merapat di daratan.

I. Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi

1. Fasilitas Rumah Tinggal

Sarana rumah tinggal yang terdapat di Kabupaten Klungkung sebanyak 35.764 unit yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kungkung sebesar 34,76% sedangkan terkecil di Kecamatan Nusa Penida sebesar 23,81%.

2. Fasilitas Kesehatan

Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya menjadi upaya penanggulangan kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Klungkung secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, dan lingkungan sehat, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan faktor yang paling utama

adalah tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan memadai. Jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Klungkung dapat di lihat dalam Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29
Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Klungkung
Tahun 2004 - 2008

No	Tenaga Kesehatan	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Dokter Umum	32	37	40	36	30
2	Dokter spesialis	11	11	11	13	13
3	Apoteker	3	12	3	1	3
4	Paramedis Perawat	249	318	181	244	206
5	Non Paramedis	116	114	48	191	53
6	Dokter Gigi	6	7	9	10	9
7	Kesehatan Masyarakat	11	15	12	14	13
	Jumlah	428	514	340	509	327

Sumber : Klungkung dalam Angka 2008

Sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Klungkung berupa Rumah Sakit Umum (RSU) sebanyak 2 unit yang terletak di ibukota kabupaten, 9 unit Puskesmas, 53 unit Puskesmas Pembantu dan 8 Puskesmas Keliling yang tersebar di 4 kecamatan. Pelayanan kesehatan di RSU berupa penyediaan ruang rawat inap dengan jumlah kamar sebanyak 64 buah dan 106 tempat tidur. Jenis pelayanannya adalah penyakit bedah, kebidanan, umum, kesehatan ibu dan anak, ruang perinatologi serta penyakit dalam. Perkembangan jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per Kecamatan Di Kabupaten Klungkung Tahun 2008 disajikan Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Per
Kecamatan Di Kabupaten Klungkung Tahun 2008

No	Kecamatan	Puskesmas	Pusk. Pembantu	Pusk. Keliling
1	Nusa Penida	3	14	1
2	Banjarangkan	2	14	2
3	Klungkung	2	14	3
4	Dawan	2	11	2

Sumber : Klungkung dalam Angka 2008

Secara umum sebaran fasilitas kesehatan sudah cukup merata di setiap wilayah kecamatan, terutama dengan adanya Puskesmas Keliling yang telah berkembang di Kabupaten Klungkung yang dapat memberikan dukungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari puskesmas ataupun puskesmas pembantu.

3. Fasilitas Peribadatan

Sesuai dengan falsafah negara, dimana pelayanan kehidupan menganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan dan sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Pemeluk agama Hindu di Propinsi Bali merupakan pemeluk agama mayoritas, begitu pula dengan di Kabupaten Klungkung. Pada Tahun 2008, prosentase penduduk pemeluk agama Hindu yaitu sebanyak 167.352 jiwa atau 96,14 % sedangkan agama-agama lain seperti Islam sebanyak 3.153 jiwa atau 2,92 %, Budha 1.095 jiwa atau 0,63%, Protestan sebanyak 535 jiwa atau 0,20% dan Katolik 191 jiwa atau 0,11%. Perkembangan jumlah pemeluk agama di Kabupaten Klungkung Tahun 2003 - 2007 disajikan pada Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Klungkung
Tahun 2004-2008

NO	AGAMA	TAHUN				
		2004	2005	2006	2007	2008
1.	Islam	4.583	5.008	5.124	5.135	3.153
2.	Kristen Protestan	368	404	354	353	535
3.	Kristen Katolik	169	176	241	191	191
4.	Hindu	163.897	164.070	165.698	168.652	167.352
5.	Budha	1.075	1.086	1.096	1.099	1.095

Sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009

Sarana tempat ibadah telah disediakan bagi pemeluk agamanya masing-masing seperti Pura, Klenteng/Vihara, Masjid, Langgar, Mushola dan Gereja sesuai dengan kebutuhan pemeluknya. Di dalam penyediaan fasilitas peribadatannya, jumlah fasilitas peribadatan terbanyak adalah untuk pemeluk agama Hindu, yang terbagi ke dalam 5 kelompok fasilitas peribadatan, yaitu

Kahyangan Tiga, Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Subak dan Kahyangan lainnya.

4. Fasilitas Perdagangan

Fasilitas perdagangan yang yang dimaksud adalah pasar, toko/warung dan artshop yang relatif cukup merata penyebarannya di tiap kecamatan di Kabupaten Klungkung. Fasilitas pasar umum yang terdapat di Kabupaten Klungkung total berjumlah 28 unit dengan sebaran terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarangkan yaitu 10 unit dan paling sedikit di Kecamatan Nusa Penida yaitu sebanyak 5 unit. Sedangkan warung/toko persebarannya relatif cukup merata di tiap kecamatan. Kelompok toko hanya terdapat di Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan, yaitu masing-masing 7 unit dan 1 unit.

Khusus untuk wilayah Klungkung Kepulauan (Kecamatan Nusa Penida), kegiatan perdagangan yang tumbuh dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Perdagangan skala lokal

- a. Merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat setempat;
- b. Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia, antara lain pasar kecamatan, toko-toko dan warung.

2) Perdagangan Skala Regional

- a. Merupakan kegiatan perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dari wilayah Nusa Penida ke wilayah Bali Daratan, Surabaya, Lombok dan wilayah lainnya;
- b. Fasilitas pendukung kegiatan perdagangan dan jasa yang tersedia saat ini masih sangat terbatas, seperti Pelabuhan Buyuk dan Toyapakeh yang hanya dapat melayani jenis kapal berukuran kecil;
- c. Keberadaan Pelabuhan Nusa Penida yang melayani kapal ro-ro diharapkan dapat melancarkan aliran barang dari Nusa Penida ke wilayah lainnya.

5. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia, untuk menunjang hal tersebut perlu adanya dukungan sarana

fisik maupun tenaga guru yang memadai. Dunia pendidikan di Kabupaten Klungkung harus segera berbenah di tengah perkembangan mulai merevitalisasinya berbagai kota dan kabupaten lain di bidang pendidikan. Pijakan utamanya bukan semata-mata perkembangan dunia pendidikan di kota/kabupaten lain, namun pada kebutuhan masyarakat. Pembenahan yang dilakukan harus menyentuh pada substansi masalah pendidikan, diantaranya: pendidikan yang bisa diakses seluruh warganya pada setiap jenjang dengan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya perlu peningkatan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendorong berkembangnya dunia pendidikan, terlebih sarana perpustakaan serta sarana-prasarana ilmu pengetahuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang dapat mendorong penguasaan informasi untuk tercapainya berbagai efisiensi. Selain itu juga pengembangan jejaring yang mampu mendorong perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Klungkung (ilmu pengetahuan, teknologi, pemikiran) dalam berbagai arah (inter-antar pelaku, regional-nasional-internasional).

Penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Klungkung dapat dikatakan secara umum sudah cukup baik. Terdapat SD, SLTP, dan SMU di seluruh Kecamatan di Kabupaten Klungkung bahkan terdapat perguruan tinggi yang terletak di Kecamatan Klungkung.

Jumlah sarana prasarana gedung pendidikan di Kabupaten Klungkung dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Jumlah gedung TK pada tahun 2004 dan 2005 sebanyak 68 unit, di tahun 2006 meningkat menjadi 69 unit, di tahun 2007 meningkat menjadi 71 unit dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 73 unit. Jumlah gedung SD dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2004 dan tahun 2005, jumlah gedung SD berjumlah 145 unit, di tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 144 unit, di tahun 2007 mengalami penurunan menjadi 143 unit dan pada tahun 2008 jumlah gedung SD berjumlah 141 unit. Jumlah gedung SMP dari tahun 2004–2006 berjumlah 22 unit, pada tahun 2007 meningkat menjadi 24 unit, sedangkan pada tahun 2008 jumlah gedung SMP yang ada di Kabupaten Klungkung berkurang menjadi 23 unit. Untuk jumlah gedung SMA/K dari Tahun 2004–2007 berjumlah 14 unit sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi 15 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.32
Perkembangan Prasarana Gedung Pendidikan di Kabupaten Klungkung
Tahun 2004 -2008

No	Jenis prasarana	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Gedung TK	68	68	69	71	73
2	Gedung SD	145	145	144	143	141
3	Gedung SMP	22	22	22	24	23
4	Gedung SMA/K	14	14	14	14	15

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung

6. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Kantor pemerintahan pusat Kabupaten Klungkung sebagian besar di Kota Semarapura sebagai ibukota kabupaten. Untuk kantor kecamatan dan kantor desa sesuai dengan fungsinya masing-masing berada di kecamatan dan desa. Sedangkan kantor pelayanan telepon terdapat di Kota Semarapura Kecamatan Klungkung.

Untuk sistem pelayanan pengiriman surat dan paket pos di Kabupaten Klungkung dilayani oleh 1 buah Kantor Pos Induk di Kota Semarapura dan 3 buah Kantor Pos Pembantu masing-masing berlokasi di Kecamatan Nusa Penida, Kecamatan Banjarangkan, dan Kecamatan Dawan. Dengan demikian berarti bahwa setiap kota, baik Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Kecamatan di Kabupaten Klungkung telah tersedia prasarana pos dan giro.

Di wilayah Klungkung Kepulauan terutama di Pulau Nusa Penida, sistem pelayanan pengiriman surat dan paket pos dilayani oleh Kantor Pos Pembantu. Pada masa mendatang harus dikembangkan prasarana pos dan giro lainnya seperti Kantor Pos tambahan untuk Sub Pusat Pelayanan Suana dan Sakti, serta agen pos desa untuk pemeratakan pelayanan pos dan giro di seluruh Pulau Nusa Penida. Penggunaan sarana sarana komunikasi pos untuk surat menyurat selama kurun waktu 2004 - 2008 mengalami penurunan tajam. Penurunan terjadi pada semua jenis surat pos yaitu surat biasa/udara, kilat biasa dan kilat tercatat. Jumlah surat pos dikirim dan di terima menurut jenisnya tahun 2004-2008 dapat di lihat pada Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33
Surat Yang Dikirim Dan Diterima Kantor Pos Kabupaten Klungkung
Dari Tahun 2004-2008

Tahun	Biasa		Kilat Biasa		Kilat Tercatat	
	Kirim	Terima	Kirim	Terima	Kirim	Terima
2004	201.964	207.739	73.277	72.500	19310	19.050
2005	150.150	212.660	51.688	46.730	17.775	18.350
2006	6.749	35.333	3.314	14.082	3.820	13.217
2007	8.891	58.569	5.747	31.246	4.366	26.603
2008	8.310	58.820	5.448	31.430	4.145	29.106
Jumlah	376.064	573.121	139.474	195.988	49416	106.326

Sumber : Klungkung Dalam Angka 2008

7. Fasilitas Penunjang Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor utama bagi Kabupaten Klungkung. Seiring dengan peran sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi di daerah, dapat dikatakan bahwa industri pariwisata Kabupaten Klungkung saat ini memiliki prospek yang baik dan memiliki daya tarik yang kompetitif, dengan komitmen dan konsistensi pembangunan pariwisata Kabupaten Klungkung yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka penerapannya dititikberatkan pada strategi pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran, pengembangan kemitraan, ketataruangan, aksebelitas, SDM, kelembagaan, investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Klungkung telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Keanekaragaman upacara keagamaan dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreatifitas seni dan keramah tamahan masyarakat, membuat Kabupaten Klungkung mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan. Secara goeografis, Kabupaten Klungkung juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi obyek wisata yang terjangkau dan mudah ditempuh.

Kabupaten Klungkung banyak memiliki destinasi wisata, baik di wilayah Klungkung Daratan maupun Klungkung Kepulauan yang memiliki Kawasan Pariwisata Nusa Penida sebagai salah satu Kawasan Pariwisata di Provinsi Bali yang cukup terkenal. Perkembangan suatu Kawasan Pariwisata diindikasikan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung baik asing maupun domestik.

Kabupaten Klungkung sebenarnya memiliki beranekaragam ODTW. Berdasarkan SK Bupati 335/1998, Klungkung memiliki 17 ODTW, di antaranya yang sangat populer Kertha Gosa, Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa Lawah dan kawasan Nusa Penida. Di samping itu, ada tiga ODTW yang kini dalam pengembangan, yaitu Watu Klotok, Desa Kamasan, dan Panti Timrah. Delapan ODTW lainnya masuk pada kategori belum berkembang. ODTW Tukad Melangit dengan arung jeramnya di Desa Bakas, Banjarangkan. Adapun tempat Wisata Kabupaten Klungkung antara lain: (1) Pura Taman Sari; (2) Goa Jepang; (3) Desa Tihingan; (4) Kertagosa; (5) Desa Wisata Kamasan; (6) Pantai Kusamba; (7) Nusa Penida; (8) Suana; (9) Karang Bolong; (10) Lembongan & Jungut Batu; (11) Pantai Atuh; (12) Teluk Sebila & Labuan Ampuak; (13) Lila Arsana; (14) Musium Nyoman Gunarsa; (15) Desa Budaga; (16) Taman Gili; (17) Goa Lawah; dan (18) Rafting. Indikator yang paling mudah dapat dilihat tentang kepariwisataan adalah jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata, data dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.34. Berdasarkan data tersebut ternyata terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2008 yaitu 91,52% dibandingkan tahun 2007. Nusa penida merupakan kawasan wisata yang semakin menonjol dikunjungi wisatawan, bahkan lebih dari 50% dari total pengunjung.

Tabel 2.34
Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Tempat-Tempat Wisata Kabupaten Klungkung Tahun 2004-2008

No	Objek Wisata	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Kerta Gosa	47.100	50.939	46.286	71.057	79.028
2	Goa Lawah	29.555	33.740	28.591	34.370	45.870
3	Kawasan Nusa Penida	83.968	57.493	49.040	37.157	150.931
4	Rafting	9.936	4.937	2.556	2.433	1.929
	Jumlah	170.559	147.109	126.483	145.017	277.758

Sumber : Profil Kabupaten Klungkung 2009

Berkembangnya kegiatan pariwisata tentu saja menuntut pula berkembangnya fasilitas penunjang pariwisata. Adapun fasilitas-fasilitas pariwisata yang dimaksud antara lain : penginapan, restoran/rumah makan, toko/kios/*artshop*, penukaran valuta asing dan lain sebagainya.

1) Penginapan/Akomodasi

Saat ini terdapat 37 buah fasilitas penginapan (hotel), dimana fasilitas ini hanya terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Klungkung. Kondisi ini dikarenakan di Kecamatan Klungkung terletak Kota Semarapura yang merupakan ibukota kabupaten, yang juga sebagai pusat fasilitas dan pemerintahan Kabupaten Klungkung, sedangkan Kecamatan Nusa Penida merupakan satu-satunya kawasan pariwisata di Kabupaten Klungkung.

Sebagian besar fasilitas penginapan baik hotel jenis berbintang/melati dan penginapan lainnya, terdapat di Kecamatan Nusa Penida yang juga merupakan kawasan pariwisata Kabupaten Klungkung. Fasilitas akomodasi dengan standar hotel berbintang sebagian besar terbangun di kawasan wisata Lembongan dan Jungutbatu.

Tabel 2.35
Hotel dan Penginapan Lainnya Dirinci Menurut Golongan Kamar
Tahun 2004 - 2008

Golongan kamar	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
< 5	2	3	3	4	4
5 - 9	12	6	8	14	16
10 - 14	9	13	7	14	20
>15	4	2	8	5	5
Jumlah	27	24	26	37	45

Sumber : Klungkung Dalam Angka 2008

2) Fasilitas Penunjang lainnya

Fasilitas penunjang pariwisata seperti rumah makan/restoran (32,61%) dan artshop (73,33%) lebih banyak terdapat di Kecamatan Nusa Penida yang merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun non domestik.

Usaha akomodasi dan rumah makan ini saling melengkapi untuk menunjang kegiatan pariwisata sehingga apabila salah satunya meningkat maka akan diikuti oleh peningkatan yang lainnya.

Sedangkan usaha rafting dan kapal pesiar hanya terdapat di Kecamatan Nusa Penida. Terdapat 2 buah usaha rafting dan 7 buah usaha kapal pesiar. Kapal-kapal pesiar ini beroperasi di perairan laut Nusa Penida dan pemilik umumnya dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dengan kapasitas angkut seluruhnya adalah 830 orang.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah senantiasa dihadapkan dengan permasalahan utama yaitu keterbatasan dana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang meluas bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk itu pengelola pemerintahan harus memiliki kompetensi analisis yaitu kemampuan menganalisa kebenaran dari berbagai kondisi dan multi faktor yang berpengaruh dalam daerah, untuk menentukan alternatif pilihan dan faktor kunci yang dapat memunculkan strategi unggulan, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang berdasarkan fakta dan data untuk menganalisa keadaan atau kondisi yang ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Untuk menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, perlu dilakukan analisa lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Analisa ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Proses pengidentifikasian analisa lingkungan ini menggunakan metode analisa SWOT dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam Rencana Strategis SKPD 5 tahun mendatang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, maupun dokumen perencanaan lainnya yang mendukung.

A. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL

Identifikasi faktor lingkungan internal dilakukan untuk menguraikan faktor faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Klungkung. Faktor kekuatan adalah situasi dan kondisi internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki kemampuan dan keunggulan strategis dalam mencapai tujuannya, sedangkan kelemahan merupakan situasi dan kondisi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Kekuatan (S)

- a) Letak geografis Kabupaten Klungkung yang strategis sebagai jalur penghubung Provinsi Bali dengan NTB.
- b) Potensi SDM perangkat daerah Kabupaten Klungkung yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi.
- c) Hubungan baik antar Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota) yang memungkinkan terciptanya jejaring (*network*) yang kuat.
- d) Tersedianya pranata (hukum dan peraturan) yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pembangunan.
- e) Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan.
- f) Tersedianya potensi sumber daya (manusia, metode, alam dan buatan) yang memadai.
- g) Tersedianya infrastruktur yang relatif memadai.
- h) Potensi lembaga kemasyarakatan yang solid dan partisipatif.
- i) Tersedia beberapa potensi komoditas unggulan.
- j) Tersedianya prasarana, sarana sosial, budaya dan ekonomi yang memadai.
- k) Transparansi dan akuntabilitas publik mulai terimplementasi dengan baik.

2. Kelemahan (W)

- a) Terbatasnya kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan.

- b) Pranata hukum dan peraturan yang ada belum terimplementasi dengan baik.
- c) Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.
- d) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha dan melihat peluang yang tersedia.
- e) Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi lokal.
- f) Belum adanya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dana pembangunan.
- g) Masih kurangnya pengembangan profesionalisme aparatur.
- h) Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan realitas sarana dan prasarana.
- i) Lemahnya penguasaan pasar lokal, regional dan internasional
- j) Kurangnya kesempatan dan peluang kerja.
- k) Belum diterapkannya e-government.
- l) Kurangnya penelitian tentang pengembangan potensi daerah.
- m) Masih kurangnya data dan informasi tentang potensi investasi.

B. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL

Faktor lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan. Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif yang berada di luar kendali organisasi pemerintah daerah yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor tantangan adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan.

1. Peluang (O)

- a) Peluang Kabupaten Klungkung untuk menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan di Kawasan Timur Provinsi Bali.
- b) Meningkatnya peran aktif masyarakat.
- c) Jejaring (*network*) yang cukup solid antara lembaga pemerintah, dan stakeholder.
- d) Hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif .
- e) Terbukanya peran aktif swasta (dunia usaha).
- f) Terbukanya peran aktif lembaga pendidikan.
- g) Meningkatnya kerjasama regional.

- h) Terwujudnya etika dan moralitas baru yang positif .
- i) Kemajuan teknologi dan komunikasi.
- j) Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.
- k) Tersedianya peluang usaha dan investasi.
- l) Tersedianya sumber tenaga kerja lokal yang memadai.
- m) Kekayaan dan keanekaragaman berbagai sumber daya alam, laut dan hutan.
- n) Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai.
- o) Nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan agama Hindu.

2. **Ancaman (T)**

- a) Potensi dan daya saing daerah tetangga yang terus berkembang.
- b) Krisis ekonomi yang berkelanjutan dan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya pengangguran.
- c) Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.
- d) Kurangnya daya saing pelaku ekonomi di Kabupaten Klungkung dan adanya hambatan di pasar global serta munculnya pesaing di pasar global.
- e) Minat usaha dan iklim dan investasi belum optimal karena hambatan birokrasi maupun perangkat hukum.
- f) Penegakan supremasi hukum dan HAM yang belum maksimal.
- g) Adanya pencemaran lingkungan dan pemanfaatan lingkungan yang tidak semestinya.
- h) Lemahnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam mengembangkan potensi menuju masyarakat yang mandiri.
- i) Masih tingginya budaya konsumenisme.
- j) Seringnya terjadi perubahan produk hukum nasional.
- k) Masih adanya eksploitasi SDA yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan perlu diidentifikasi lebih dahulu guna lebih memfokuskan arah, tahapan, dan strategi pembangunan 5 tahun mendatang dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditentukan. Arah, tahapan, dan strategi disusun dengan cara menetapkan tujuan dan sasaran serta strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas. Dengan ditetapkannya skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung, maka dapat diperoleh informasi yang komprehensif tentang apa yang harus diimplementasikan dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan pembangunan 5 tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan 10 (sepuluh) program unggulan daerah Kabupaten Klungkung, maka Faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan Kabupaten Klungkung 5 tahun mendatang adalah :

1. Komitmen aparatur birokrasi pemerintah daerah yang selalu berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi pada setiap program kerjanya.
2. Peningkatan penggalan PAD dan sumber keuangan lainnya untuk mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan anggaran belanja daerah yang berbasis kinerja dengan indikator pencapaian yang jelas serta adanya refleksi terhadap program yang telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan program.
4. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah agar mampu masuk dalam pasar global.
6. Konsistensi kebijakan yang dapat mendorong minat usaha dan investasi.
7. Penegakan supremasi hukum dan HAM.

D. STRATEGI BERDASAR SWOT

Berdasarkan atas analisis faktor internal dan faktor eksternal daerah Kabupaten Klungkung, maka dapat disusun strategi berdasarkan atas faktor di atas. Strategi tersebut disajikan dalam matrik berikut ini:

Tabel 3.1 Matrik Strategi Berdasar SWOT

	<u>Kekuatan (S)</u>	<u>Kelemahan (W)</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis Kabupaten Klungkung yang strategis sebagai jalur penghubung Propinsi Bali dengan NTB. 2. Potensi SDM perangkat daerah Kabupaten Klungkung yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi. 3. Hubungan baik antar Pemerintah (Pusat, Propinsi, kabupaten dan kota) yang memungkinkan terciptanya jejaring (network) yang kuat. 4. Tersedianya pranata (hukum dan peraturan) yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pembangunan. 5. Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan. 6. Tersedianya potensi sumberdaya (manusia, metode, alam dan buatan) yang memadai. 7. Tersedianya infrastruktur yang relatif memadai. 8. Potensi lembaga kemasyarakatan yang solid dan partisipatif. 9. Tersedia beberapa potensi komoditas unggulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan. 2. Pranata hukum dan peraturan yang ada belum terimplentasi dengan baik. 3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral. 4. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha dan melihat peluang yang tersedia. 5. Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi lokal. 6. Belum adanya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dana pembangunan. 7. Masih kurangnya profesionalisme aparatur. 8. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan realitas sarana dan prasarana. 9. Lemahnya penguasaan pasar lokal, regional dan internasional 10. Kurangnya kesempatan dan peluang kerja. 11. Belum diterapkannya e-government.

	<p>10. Tersedianya prasarana, sarana sosial, budaya dan ekonomi yang memadai.</p> <p>11. Transparansi dan akuntabilitas publik mulai terimplementasi dengan baik</p>	<p>12. Kurangnya penelitian tentang pengembangan potensi daerah.</p> <p>13. Masih kurangnya data dan informasi tentang potensi investasi</p>
<p><u>Peluang (O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peluang Kabupaten Klungkung untuk menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan di Kawasan Timur Provinsi Bali . 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat. 3. Jejaring (network) yang cukup solid antara lembaga pemerintah, dan stakeholder. 4. Hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif . 5. Terbukanya peran aktif swasta (dunia usaha). 6. Terbukanya peran aktif lembaga pendidikan. 7. Meningkatnya kerjasama regional. 8. Terwujudnya etika dan moralitas baru yang positif . 9. Kemajuan teknologi dan komunikasi. 10. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima. 11. Tersedianya peluang usaha dan investasi. 12. Tersedianya sumber tenaga kerja lokal yang memadai. 13. Kekayaan dan keanekaragaman berbagai sumber daya alam, laut dan hutan 14. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang 	<p><u>Strategi S-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan sarana dan prasarana yang ada serta ciptakan iklim yang kondusif agar Kabupaten Klungkung dapat menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan di Kawasan Timur Bali. 2. Tingkatkan kerjasama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dengan dukungan hubungan baik antara pemerintah (pusat dan propinsi). 3. Ciptakan kerjasama regional dengan dukungan hubungan baik pemerintah (pusat, propinsi , kabupaten dan kota). 4. Fasilitasi peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan melalui peran aparatur pemerintah yang profesional. 5. Wujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan menjalin kerjasama regional, nasional dan internasional. 6. Tingkatkan peran aparatur pemerintah dalam mewujudkan etika dan moralitas baru. 7. Manfaatkan sumber daya (manusia, alam, metode dan buatan) yang tersedia dalam 	<p><u>Strategi W-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan jejaring (network) antar lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan swasta melalui peningkatan koordinasi lintas sektoral secara optimal. 2. Optimalkan koordinasi lintas sektoral guna mendukung kerjasama regional, nasional dan internasional. 3. Manfaatkan etika moral yang baik dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 4. Tingkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat melalui jalinan kerjasama regional dan nasional. 5. Kembangkan ekonomi lokal secara optimal melalui peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan. 6. Tingkatkan penguasaan pasar lokal, regional dan internasional melalui peran aktif masyarakat dan swasta . 7. Tingkatkan jejaring bisnis melalui peran aktif masyarakat dan swasta guna mendukung kerjasama regional maupun

<p>memadai</p> <p>15. Nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat</p>	<p>meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta</p> <p>8. Manfaatkan dukungan pihak swasta dalam rangka pemberdayaan masyarakat.</p> <p>9. Tingkatkan sarana dan prasarana sosial, budaya, dan ekonomi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.</p> <p>10. Manfaatkan kelembagaan masyarakat yang ada guna mendukung peningkatan daya saing, kemandirian dan kesejahteraan.</p> <p>11. Wujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah menuju tata pemerintahan yang baik dalam rangka menumbuhkan kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan swasta.</p> <p>12. Tingkatkan dan pelihara stabilitas politik, keamanan dan ketertiban dalam daerah guna mendukung terlaksananya aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan</p> <p>13. Manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat.</p> <p>14. Kembangkan komoditas unggulan melalui peran aktif masyarakat dan swasta agar dapat menjadi komoditas ekspor yang berkualitas.</p>	<p>internasional.</p> <p>8. Tingkatkan profesionalisme dan proporsi aparatur pemerintah daerah dalam mendukung kerjasama regional dan internasional</p> <p>9. Manfaatkan teknologi dan informasi dalam mendukung penerapan e- government guna mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang solid dan profesional.</p> <p>10. Tingkatkan penelitian tentang potensi daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada untuk peningkatan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>11. Tingkatkan ketersediaan dan akurasi data dan informasi tentang potensi investasi untuk menarik minat investor melakukan investasi di Kabupaten Klungkung agar dapat meningkatkan perekonomian daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.</p>
<p><u>Ancaman (T)</u></p> <p>1. Potensi dan daya saing</p>	<p><u>Strategi S-T</u></p> <p>1. Manfaatkan hubungan yang</p>	<p><u>Strategi W-T</u></p> <p>1. Optimalkan potensi</p>

<p>daerah tetangga yang terus berkembang .</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Krisis ekonomi yang berkelanjutan dan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya pengangguran 3. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. 4. Kurangnya daya saing pelaku ekonomi di Kabupaten klungkung dan adanya hambatan di pasar global serta munculnya pesaing di pasar global. 5. Minat usaha dan iklim dan investasi belum optimal karena hambatan birokrasi maupun perangkat hukum. 6. Penegakan supremasi hukum dan HAM yang belum maksimal. 7. Adanya pencemaran lingkungan dan pemanfaatan lingkungan yang tidak semestinya. 8. Lemahnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam mengembangkan potensi menuju masyarakat yang mandiri. 9. Masih tingginya budaya konsumerisme. 10. Seringnya terjadi perubahan produk hukum nasional. 11. Masih adanya eksploitasi SDA yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 	<p>baik antar pemerintah dalam rangka menghadapi persaingan regional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkatkan peran dan kemampuan aparatur pemerintah dalam menghadapi persaingan regional dan perubahan kondisi dinamika politik 3. Tingkatkan kemampuan SDM masyarakat agar dapat menghadapi krisis ekonomi yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan daya beli. 4. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka mengurangi pengangguran. 5. Tingkatkan kinerja lembaga masyarakat melalui pembinaan oleh aparatur pemerintah dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi lokal. 6. Manfaatkan sumberdaya yang ada guna menghadapi persaingan regional dan perubahan geopolitik. . 7. Manfaatkan dukungan pihak swasta untuk menghadapi persaingan regional. 8. Manfaatkan sumberdaya yang ada dalam menciptakan supremasi hukum. 9. Tingkatkan peran aparatur pemerintah daerah dalam rangka perwujudan supremasi hukum. 10. Manfaatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam rangka penegakan supremasi hukum. 11. Manfaatkan kelembagaan 	<p>sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan dana pembangunan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tingkatkan kemampuan apratur pemerintah dalam melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menhadapi persaingan regional. 3. Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk menghadapi perubahan geopolitik dan dinamika sosial politik. 4. Tingkatkan keberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan regional dan perubahan geopolitik. 5. Tingkatkan sosialisasi hukum untuk mewujudkan supremasi hukum. 6. Sosialisasikan dan tegakkan aturan tentang hukum dan penyakit masyarakat lainnya. 7. Manfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal untuk menghadapi persaingan regional. 8. Tingkatkan kemampuan penguasaan pasar dalam menghadapi persaingan global. 9. Tingkatkan peran pemerintah dan swasta dalam menciptakan jejaring bisnis yang kuat dan luas. 10. Tingkatkan kemampuan manajerial aparatur pemerintah dalam menghadapi transformasi birokrasi.
--	--	--

	<p>masyarakat dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum.</p> <p>12. Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menghadapi persaingan regional dan menanggulangi berbagai macam penyakit masyarakat.</p>	<p>11. Aplikasikan e-government dalam menghadapi persaingan regional.</p>
--	--	---

E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH

1. Pertumbuhan Ekonomi

Peluang :

- a) Kinerja perekonomian Kabupaten Klungkung yang positif selama beberapa tahun terakhir dipicu oleh kenaikan pertumbuhan pada semua sektor secara variatif.
- b) Peluang perkembangan perekonomian di Kabupaten Klungkung juga ditunjang oleh kenyataan bahwa Kabupaten Klungkung menjadi daerah tujuan wisata alternatif selain Denpasar dan Gianyar.
- c) Sebagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Klungkung memberi peluang positif bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Klungkung. Masuknya uang wisatawan dalam jumlah banyak berdampak positif terhadap perkembangan sektor jasa, sehingga secara makro akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung.
- d) Kinerja pemerintahan yang positif dan profesional berdampak positif terhadap perkembangan dunia usaha, sehingga memberi peluang peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak dan retribusi. Peningkatan pendapatan, akan berpengaruh positif terhadap kemampuan belanja pemerintah.

Tantangan :

- a) Masih belum pulihnya kunjungan wisatawan ke Bali memberi dampak terhadap perkembangan pariwisata Kabupaten Klungkung.
- b) Krisis finansial global berpengaruh terhadap dunia usaha terutama usaha kerajinan industri kecil yang banyak memproduksi barang cinderamata dan menimbulkan potensi PHK serta penurunan perekonomian Kabupaten Klungkung.
- c) Pergeseran sistem nilai dan lunturnya kearifan lokal yang mempengaruhi citra Kabupaten Klungkung sebagai daerah budaya, daerah pusat sejarah dan tujuan wisata.

Isu Strategis :

- a) Ketahanan kinerja PDRB terhadap krisis finansial global.
- b) Proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2009 sampai dengan 2010 sedikit akan mengalami penurunan sebagai dampak krisis finansial global, yang akan mengakibatkan ekspor beberapa jenis komoditas akan mengalami kelesuan, sehingga produsen akan mengurangi produksi dan kemungkinan terjadi PHK.
- c) Para pengusaha juga akan menunda berinvestasi karena tingkat bunga cukup tinggi menyusul kenaikan BI rate yang berpengaruh terhadap peningkatan tingkat bunga pinjaman. Sedangkan Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sampai dengan 2013 akan mengalami kenaikan.
- d) Secara kuantitatif proyeksi pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Klungkung dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2006 adalah 5,03; tahun 2007 adalah 5,54 dan tahun 2008 adalah 5,07, serta pengembangan potensi dan kondisi sektor ekonomi yang dimiliki, masalah keamanan, perkembangan ekonomi nasional serta asumsi-asumsi lainnya maka pertumbuhan ekonomi Klungkung tahun 2009 diproyeksikan sebesar 5,80%. Untuk mencapai angka pertumbuhan tersebut maka nilai tambah atau produktivitas sektor-sektor ekonomi seperti sektor pertanian, industri kecil kerajinan rumah

tangga, transportasi dan komunikasi serta perdagangan hotel dan restoran hendaknya mampu ditingkatkan. Demikian juga dari sisi konsumsi, investasi dan ekspor yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian laju pertumbuhan hendaknya mampu ditingkatkan.

2. Investasi

Peluang :

- a) Spesifikasi keunggulan lokal Kabupaten Klungkung dibidang pariwisata.
- b) Komitmen Pemerintah Daerah yang terbuka untuk investor.
- c) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Tantangan :

- a) Investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil dan Investasi yang mengarah pada kelestarian lingkungan Optimalisasi iklim investasi.
- b) Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
- c) Regulasi yang mantap dalam hal fasilitasi investasi.
- d) Peningkatan kerjasama penanaman modal dengan investor untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah Klungkung.

Isu Strategis :

- a) Persaingan global dengan daerah maupun provinsi lain dan negara lain yang lebih maju dalam merebut investasi.
- b) Penyediaan fasilitas dan kemudahan investasi guna peningkatan daya saing.
- c) Perwujudan investasi yang mengarah pada keunggulan lokal Kabupaten Klungkung.
- d) Sistem pelayanan investasi yang sangat mudah.

3. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Peluang :

- a) Berkembangnya pariwisata dunia menjadi peluang daerah dalam pengembangan industri, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah.
- b) Berkembangnya jumlah penduduk, sehingga berpeluang meningkatkan sektor industri dan perdagangan pengolahan makanan maupun industri dan perdagangan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
- c) Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk Industri, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- d) Otonomi daerah memungkinkan daerah membuat kebijakan yang pro Industri, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- e) Biaya produksi sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang relatif masih rendah dibanding dengan daerah lain karena di daerah Klungkung sumber-sumber produksi relatif mudah diperoleh.
- f) Tersedianya SDM yang memadai dalam mendukung kegiatan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah.
- g) Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi.

Tantangan :

- a) Optimalisasi informasi potensi ekonomi daerah untuk pengembangan Industri, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi belum berjalan dengan baik.
- b) Optimalisasi pengembangan Industri, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang berkesinambungan sehingga daya saing tetap tinggi.
- c) Optimalisasi pengembangan produk karya seni dan kreatif.

Isu Strategis :

- a) Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi.
- b) Pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal dan efisien dan berperan strategis didalam menunjang pengembangan

Industri, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

- c) Perkuatan kemandirian Industri, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan nilai tambah dan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Klungkung.
- d) Pengembangan klaster industri yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan keunggulan kompetitif serta berperan strategis dalam pengembangan Industri, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten Klungkung.
- e) Proyeksi jumlah unit usaha, tenaga kerja dan nilai produksi di sektor IKM seperti tersebut di bawah ini. Jumlah perusahaan industri sedang tahun 2008 sebanyak 23 perusahaan yang didominasi golongan industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (52,17%) industri tekstil yang dimaksud adalah endek dan songket. Penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang mencapai 713 orang.

4. Pertanian

Peluang :

- a) Lahan pertanian di Kabupaten Klungkung cukup luas baik pertanian tanaman basah maupun kering, sehingga berpotensi terhadap peningkatan produksi.
- b) Peningkatan daya saing produk-produk pertanian
- c) Pengembangan komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
- d) Pengembangan varietas unggul daerah
- e) Pengembangan kawasan pertanian
- f) Peningkatan nilai tambah produk pertanian
- g) Pengembangan pertanian berkelanjutan

Tantangan :

- a) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- b) Potensi perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan.

- c) Minimnya modal usaha petani.
- d) Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengimpor beberapa jenis komoditas pertanian.
- e) Peningkatan kualitas SDM.

Isu Strategis :

- a) Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan).
- b) Menurunnya daya dukung lahan dan air.
- c) Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis penyediaan pangan global.
- d) Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura yang berbasis agribisnis.
- e) Pengembangan agro-industri (industri pengolahan hasil pertanian).
- f) Proyeksi sektor pertanian relatif stabil dalam arti jumlah produksi akan meningkat seiring peningkatan produktivitas lahan pertanian.

5. Ketahanan Pangan

Peluang :

- a) Pengembangan ketersediaan pangan yang terjangkau oleh setiap rumah tangga.
- b) Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjaminnya akses pangan bagi masyarakat.
- c) Pengembangan diversifikasi pangan berbasis potensi pangan lokal.
- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).
- e) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan (ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan).

Tantangan :

- a) Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan.

- b) Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas (*degradasi*) lahan produktif.
- c) Relatif masih besar ketergantungan akan bahan pangan dan inputan untuk produksi pangan dari luar daerah maupun luar negeri (*food trap*).
- d) Masih terbatasnya sarana dan penegakan hukum disepanjang jalur distribusi pangan.
- e) Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan.
- f) Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, dan bergizi.
- g) Menurunnya kinerja penyuluhan sebagai dampak dari menurunnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh.

Isu Strategis :

- a) Krisis ekonomi global yang berdampak pada krisis pangan.
- b) Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok.
- c) Bahan additive pada makanan yang berpengaruh pada keamanan pangan.
- d) Beredarnya produk pangan yang sudah kadaluwarsa.
- e) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.
- f) Sarana prasarana penyuluh belum memenuhi standar.
- g) Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana (kronis dan transien).
- h) Masih adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

6. Kehutanan dan Perkebunan

Peluang :

- a) Optimalisasi lahan negara, perkebunan dan lahan kering yang potensial untuk hutan rakyat.

- b) Multifungsi hutan bagi kehidupan manusia meliputi fungsi ekonomi, ekologi dan sosial.
- c) Terbukanya peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- d) Terbukanya peluang pengembangan kawasan konservasi untuk mendukung pendidikan, budaya dan kepariwisataan.
- e) Terbukanya peluang pengembangan agribisnis perkebunan.
- f) Terbukanya pangsa pasar produk kehutanan dan perkebunan.
- g) Kepedulian kelompok masyarakat di dalam peningkatan pelestarian hutan.
- h) Terbukanya peluang kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan kebun.
- i) Terbukanya peluang pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi.

Tantangan :

- a) Luas hutan yang masih minim dalam suatu wilayah yang berfungsi sebagai penyangga iklim dan tata air bagi ekosistem.
- b) Tingkat pencurian kayu hutan masih tinggi.
- c) Sebagai sumber pendapatan petani kebun dan masyarakat sekitar hutan.
- d) Berlangsungnya arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan hasil hutan.
- e) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan rendah.
- f) Kelembagaan masyarakat kehutanan dan perkebunan belum berkembang secara produktif.
- g) Terjadinya gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumber daya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan.
- h) Daya saing produk perkebunan primer maupun hasil olahannya belum mampu bersaing.
- i) Peredaran benih hutan/perkebunan yang belum bersertifikat/berlabel masih tinggi.

Isu Strategis :

- a) *Illegal logging* dan perusakan hutan.
- b) Pemanasan global.
- c) Rendahnya daya saing produk perkebunan.
- d) Peranan kehutanan dan perkebunan di dalam mendukung mengurangi kemiskinan bagi petani hutan/kebun serta peningkatan peluang kerja dan usaha.
- e) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mendorong peningkatan daya dukung lahan, air dan ekosistem.
- f) Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan/kebun sesuai tuntutan pembangunan.
- g) Proyeksi luas areal sektor kehutanan, khususnya luas areal hutan negara dari tahun ke tahun tetap, sedangkan untuk luas areal hutan rakyat diproyeksikan mengalami peningkatan.

7. Perikanan dan Kelautan

Peluang :

- a) Potensi perikanan budidaya masih terbuka dan perikanan tangkap masih cukup besar .
- b) Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Klungkung.
- c) Adanya tempat-tempat pelelangan/penjualan ikan dan pelabuhan.
- d) Pemasaran produk perikanan domestik maupun luar negeri.

Tantangan :

- a) Peningkatan kualitas dan keanekaragaman alat tangkap ikan.
- b) Peningkatan modal usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan.
- c) Stabilisasi harga produk perikanan.
- d) Peningkatan teknologi budidaya dan pengolahan hasil tangkapan ikan.
- e) Minimalisasi hama dan penyakit pada perikanan budidaya.
- f) Peningkatan minat dan budaya melaut bagi masyarakat Kabupaten Klungkung.

- g) Peningkatan SDM perikanan.

Isu Strategis :

- a) Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan.
- b) Optimalisasi penangkapan dan pengelolaan perikanan melalui Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida dan Minapolitan.
- c) Penegasan batas teritorial wilayah penangkapan.
- d) Potensi usaha ikan hias yang semakin diminati.
- e) Potensi terjadinya *illegal fishing*.
- f) Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat mengingat besarnya potensi dan peluang yang tersedia.

8. Energi dan Sumber Daya Mineral

Peluang :

- a) Sumber daya mineral atau bahan tambang yang ada di Daerah Kabupaten Klungkung, khususnya bahan galian golongan C yang jumlahnya melimpah belum diusahakan secara optimal.
- b) Ketersediaan sumber daya alam dalam hal ini air, angin, matahari, ombak yang melimpah merupakan potensi yang baik bagi pengembangan energi ketenagalistrikan.

Tantangan :

- a) Pemanfaatan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan bagi eksploitasi bahan galian.
- b) Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna mendorong pemerataan pembangunan.
- c) Melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.

Isu Strategis :

- a) Alih teknologi yang ramah lingkungan dalam eksploitasi bahan galian.
- b) Pemanfaatan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan.
- c) Pemerataan kebutuhan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

9. Pariwisata

Peluang :

- a) Kebutuhan berwisata sebagai tren globalisasi.
- b) Menguatnya minat berwisata dan tingginya Wisata Minat Khusus.
- c) Kedudukan dan peran Daerah Kabupaten Klungkung sebagai destinasi unggulan wisatawan.
- d) Perkembangan keamanan perekonomian negara/daerah lain
- e) Kecenderungan wisatawan Eropa untuk ke Asia Pasifik.
- f) Tingginya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.
- g) Adanya kebijakan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung untuk menjadikan Klungkung sebagai daerah tujuan wisata.

Tantangan :

- a) Kompetisi market pariwisata yang ketat.
- b) Peningkatan berkelanjutan kreativitas dan inovasi pengelolaan pariwisata.
- c) Peningkatan daya saing ODTW.
- d) Peningkatan kualitas SDM pariwisata.

Isu Strategis :

- a) Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal melalui penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida.
- b) Penataan dan pembangunan sarana dan prasarana terhadap berbagai potensi objek wisata yang ada dan pengembangan DTW baru di Kabupaten Klungkung seperti Tihingan, Kamasan, Bukit

Abah, Kusamba, Pantai-pantai di Klungkung daratan dan lain-lain.

F. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS SOSIAL BUDAYA

1. Kependudukan

Peluang :

- a) Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya merupakan peluang untuk memudahkan manajemen kependudukan.
- b) Cakupan jumlah kecamatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Tantangan :

- a) Masih kurangnya pemerataan penyebaran penduduk serta terbatasnya daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Isu Strategis :

- a) Keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- b) Menata dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan berbasis SIAK.

2. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Peluang :

- a) Ketersediaan angkatan kerja terdidik.
- b) Relatif tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi.

Tantangan :

- a) Perluasan lapangan kerja.
- b) Pengurangan pengangguran.

Isu Strategis :

- a) Perluasan kesempatan kerja.
- b) Peningkatan kualitas angkatan kerja.
- c) Memberangkatkan warga transmigran asal Kabupaten Klungkung ke daerah penerimaan unit penempatan transmigrasi.
- d) Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.

3. Kesejahteraan Sosial

Peluang :

- a) Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan ruang gerak masyarakat dalam menghadapi permasalahannya.
- b) Banyaknya sektor informal tumbuh di masyarakat.
- c) Mewujudkan kemandirian masyarakat.

Tantangan :

- a) Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan sumber daya ekonomi.
- b) Menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat melalui sektor formal maupun informal.

Isu Strategis :

- a) Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- b) Penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah Kabupaten Klungkung.
- c) Penanganan para penyandang cacat, panti asuhan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

4. Kesehatan

Peluang :

- a) Ketersediaan prasarana dan sarana serta sumber daya kesehatan yang memadai.

Tantangan :

- a) Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.
- b) Peningkatan dan pemutakhiran fasilitas, sarana, dan teknologi pelayanan kesehatan.

Isu Strategis :

- c) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui kesadaran berperilaku hidup sehat sejalan dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Pendidikan

Peluang :

- a) Kesadaran Masyarakat Klungkung terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi meningkat.
- b) Banyaknya SDM yang berkecimpung di dunia pendidikan.
- c) Interaksi sosial yang cukup intensif di masyarakat.

Tantangan :

- a) Dampak negatif dari adanya interaksi sosial dan globalisasi.
- b) Perlu penyamaan persepsi dan pemahaman yang komprehensif antar *stakeholders* untuk mewujudkan Daerah Kabupaten Klungkung sebagai pusat pendidikan menuju *Center of Excellence Cultural*.

Isu Strategis :

- a) Peningkatan dan pemerataan pelayanan dan mutu pendidikan.
- b) Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada budaya lokal dan berdaya saing tinggi.

6. Kebudayaan

Peluang :

- a) Daerah Kabupaten Klungkung masih dimungkinkan ditata menjadi kawasan berbudaya terkemuka yang humanis, kreatif, asri, dan nyaman serta memiliki peluang besar untuk mengembangkan dirinya sebagai pusat budaya.

- b) Pemanfaatan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai media membangun jejaring global dan internasional.

Tantangan :

- a) Kawasan dan benda cagar budaya terganggu fungsi dan makna filosofinya karena perkembangan ekonomi dan aktivitas manusia.
- b) Masuknya nilai-nilai dan kebudayaan asing yang cukup gencar perlu disikapi dengan bijak agar tidak melunturkan nilai-nilai dan kearifan lokal.
- c) Antisipasi dampak negatif dari pesatnya perkembangan Sistem informasi dan teknologi.

Isu Strategis :

- a) Peningkatan ketahanan budaya dan nilai-nilai budaya daerah .
- b) Pengembangan Seni dan Budaya Daerah dan pelestarian Adat dan Budaya Bali sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan melalui penguatan lembaga dan organisasi kebudayaan tradisional.
- c) Mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat yang memberikan efek ganda terhadap pengembangan Kabupaten Klungkung.

7. Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja

Peluang :

- a) Potensi SDM perempuan dalam pembangunan.
- b) Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.
- c) Banyaknya lembaga donor untuk pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja.
- d) Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang *concern* pada masalah pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan remaja.

Tantangan :

- a) Membangun strategi pemberdayaan yang meminimalkan konflik peran.
- b) Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa anak-anaknya, baik secara fisik maupun psikis.
- c) Menciptakan lingkungan, sarana-prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak juga remaja.

Isu Strategis :

- a) Peningkatan dan perluasan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik, sosial budaya, dan lingkungan.
- b) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja.
- c) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- d) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan yang mandiri.
- e) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB dan Keluarga Sejahtera

8. Pemuda dan Olahraga

Peluang :

- a) Daerah Kabupaten Klungkung berpeluang sebagai pusat pendidikan dan kegiatan olah raga daerah bagian timur dengan telah dibangunnya GOR Swecapura.
- b) Potensi SDM pemuda dalam pembangunan.
- c) Semakin berkembangnya industri barang dan jasa memberi peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda.
- d) Semakin banyak *event* olahraga dan perusahaan sponsor yang memberikan peluang untuk membudayakan olahraga dan menambah ruang publik untuk olahraga.

Tantangan :

- a) Menciptakan lingkungan serta penyediaan prasarana dan sarana untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian serta meminimalkan dampak negatif globalisasi bagi pemuda.
- b) Menciptakan lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olah raga di kalangan masyarakat.

Isu Strategis :

- a) Peningkatan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam meningkatkan olahraga dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olah raga.

9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peluang :

- a) Daerah Kabupaten Klungkung sebagai daerah pertanian dan industri kecil menengah dan pariwisata potensial bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian.
- b) Angka melek huruf cukup tinggi.
- c) Semakin berkembangnya industri berbasis sains dan teknologi.

Tantangan :

- a) Membangun kemandirian pengembangan IPTEK.
- b) Mengefektifkan penyebaran dan komunikasi hasil pengembangan IPTEK.

Isu Strategis :

- a) Pengembangan IPTEK untuk industri kecil dan menengah dan pertanian berbasis sains dan TI.
- b) Pengembangan data dan informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan potensi daerah.

10. Penanggulangan Bencana

Peluang :

- a) Terbukanya sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
- b) Masih hidupnya nilai-nilai kerukunan, kerjasama dan gotong royong dalam menghadapi risiko bencana.
- c) Banyaknya kajian yang menjadikan Daerah Kabupaten Klungkung sebagai rujukan penanganan dan penanggulangan bencana.

Tantangan :

- a) Meningkatkan peran kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi.
- b) Mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dengan kelembagaan yang kuat.
- c) Melakukan identifikasi, mengkaji, memantau resiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini.
- d) Mengurangi cakupan resiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Isu Strategis :

- a) Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
- b) Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan.
- c) Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana.
- d) Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat.
- e) Pembentukan BPBD sebagai SKPD

G. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS PRASARANA DAN SARANA

1. Transportasi

Peluang :

- a) Dukungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap Pengelolaan angkutan umum .

- b) Letak Daerah Kabupaten Klungkung yang berada pada poros lintas Jawa - Lombok baik sisi lalu lintas angkutan barang maupun jasa

Tantangan :

- a) Tingginya jumlah pemakaian kendaraan pribadi terutama sepeda motor terus meningkat.
- b) Aksesibilitas wilayah yang belum merata dan masih banyaknya tempat - tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi.
- c) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian ruang manfaat jalan (rumaja) untuk kegiatan di luar kegiatan transportasi.
- d) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, guardrail dan APILL) yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan mengarahkan pergerakan lalu lintas jalan.
- e) Kurangnya kepedulian dan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai salah satu solusi pengurangan kemacetan.
- f) Untuk angkutan barang, selama ini di wilayah Daerah Kabupaten Klungkung belum mempunyai dermaga penyebrangan ke Nusa Penida.

Isu Strategis:

- a) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan informasi yang memadai.
- b) Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan menuju daerah pedesaan dan perkotaan, kawasan budaya, dan kawasan wisata (DTW) serta sentra-sentra industri kecil.
- c) Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi yang menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan.
- d) Pengembangan prasarana terminal dengan menitikberatkan pada kemudahan transfer antar moda.

- e) Pengembangan infrastruktur angkutan barang dengan memberikan kemudahan transfer point angkutan umum dengan angkutan barang.
- f) Melibatkan organisasi Koperasi dan Organda untuk membentuk system angkutan darat Kabupaten Klungkung.
- g) Mewujudkan pelabuhan penyeberangan di Klungkung daratan untuk kelancaran penyeberangan laut ke Nusa Penida.

2. Sumber Daya Air

Peluang :

- a) Dengan pemberlakuan otonomi daerah membuka peluang optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta dan asing dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk keperluan konservasi SDA, pendayagunaan air dan pengendalian kerusakan.
- b) Pemerintah juga dapat memanfaatkan potensi dukungan masyarakat dalam pengelolaan SDA.
- c) Sungai Unda Kabupaten Klungkung yang merupakan potensi bagi penyediaan air untuk keperluan pertanian secara luas maupun domestik di perkotaan dan perdesaan.

Tantangan :

- a) Perlu segera untuk melakukan penyusunan pola pengelolaan SDA yang berbasis wilayah sungai dengan mendasarkan pada data-data yang ada dalam Sistem Informasi SDA.
- b) Dalam melakukan konservasi SDA, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang berasal dari pengelola maupun dari alam. Tantangan dari pihak pengelola SDA adalah kurangnya koordinasi antar wilayah dan sektor dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal.
- c) Masih belum tercapainya efisiensi sarana dan prasarana irigasi yang mengakibatkan masih belum maksimalnya daerah irigasi untuk mendapat layanan irigasi.

- d) Tindakan-tindakan merusak lingkungan menimbulkan dampak negatif khususnya berkaitan dengan penyediaan air, pencemaran air, termasuk kontrol yang lebih ketat terhadap alih fungsi lahan.

Isu Strategis :

- a) Pengelolaan SDA terpadu dan bijaksana, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan .
- b) Pemberdayaan petani pemakai air.
- c) Efisiensi sarana dan prasarana irigasi.
- d) Manajemen sumber daya air yang profesional dan efektif.
- e) Mengurangi bahaya banjir dan kekeringan.
- f) Pengendalian pencemaran air dari sumber yang tidak bergerak dan limbah B3.

3. Air Minum/Air Bersih

Peluang :

- a) Adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan air minum/air bersih.
- b) Adanya utilitas produksi dan jaringan air minum/air bersih.

Tantangan :

- a) Ketersediaan sumber-sumber air yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan baik distribusi , manajemen operasional maupun kualitas dan kuantitas hasil produksi.

Isu Strategis :

- a) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih di perkotaan dan perdesaan.
- b) Pengembangan penyediaan sumber-sumber air dan optimalisasi sumber-sumber air yang sudah ada.
- c) Peningkatan pengelolaan air minum melalui KPS.

4. Air Limbah/Sanitasi

Peluang :

- a) Adanya infrastruktur pengelolaan air limbah.
- b) Kerjasama pengelolaan air limbah/sanitasi.

Tantangan :

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
- b) Infrastruktur pengelolaan air limbah yang belum mencakup seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan.

Isu Strategis :

- a) Pengelolaan Air limbah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.
- b) Optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi prasarana dan sarana air limbah.

5. Persampahan dan Drainase

Peluang :

- a) Kerjasama pengelolaan Persampahan.
- b) Pengelolaan sampah oleh masyarakat dan swasta.
- c) Teknologi pengelolaan sampah.
- d) Adanya saluran drainase dan penerapan Sumur Resapan Air Hujan (SPAH) sebagai bagian dari sistem makro.

Tantangan :

- a) Penggunaan sungai dan anak sungai sebagai penerima air buangan.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan jaringan drainase.
- c) Sarana dan prasarana yang belum optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat .
- d) Belum ada ketegasan fungsi sistem drainase .

Isu Strategis :

- a) Pengelolaan sampah/ drainase terpadu.
- b) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase.

6. Perumahan dan Permukiman

Peluang :

- a) Kebutuhan akan perumahan yang besar, terutama di perkotaan.

Tantangan :

- a) Terdapat *backlog* yang cukup besar antara kebutuhan dan penyediaan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b) Tumbuhnya permukiman padat dan kumuh di daerah perkotaan.

Isu Strategis :

- a) Pembangunan pemukiman yang layak huni bagi masyarakat.
- b) Penanganan daerah kumuh perkotaan .

7. Listrik

Peluang :

- a) Potensi kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah luar negeri untuk penciptaan sumber energi listrik terbarukan.
- b) Potensi pengembangan bayu energi di Nusa Penida.
- c) Inovasi masyarakat dalam penemuan energi listrik terbarukan.

Tantangan :

- a) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap penggunaan energi secara mandiri.
- b) Kurangnya penemuan sumber energi listrik terbarukan.
- c) Belum optimalnya penciptaan teknologi untuk mengolah sumber energi.
- d) Inefisiensi pemakaian listrik

Isu Strategis :

- a) Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil.

- b) Pengembangan energi listrik terbarukan.
- c) Penghematan energi listrik.
- d) Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan.
- e) Kerja sama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik.

8. Komunikasi dan Informatika

Peluang :

- a) Terbukanya akses masyarakat terhadap informasi terkini.
- b) Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi daerah.
- c) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara on line, yang mengacu pada konsep consumer service priority.

Tantangan :

- a) Ketersediaan data terbaru (*up to date*) masih kurang.
- b) Pelayanan berbasis *on line* masih terbatas sehingga keluhan dan permasalahan masyarakat tidak dapat terselesaikan secara cepat dan tepat.
- c) Biaya internet yang relatif masih mahal
- d) Penyediaan *one stop information service* di tempat-tempat strategis masih terbatas.
- e) Optimalisasi lembaga-lembaga komunikasi sosial dan lembaga media tradisional sebagai lembaga komunikasi strategis.

Isu Strategis :

- a) Pengembangan *Digital Government Services/E-gov*.
- b) Pengembangan infrastruktur jaringan.
- c) Pelayanan kepada masyarakat secara on line .
- d) Penyediaan internet murah dan internet masuk desa.
- e) Sosialisasi dan diseminasi informasi publik.
- f) Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu.
- g) Pemberdayaan informasi masyarakat memanfaatkan sumber daya komunikasi sosial dan lembaga media tradisional serta kelompok strategis lain.

- h) Penyerapan aspirasi dan opini publik.
- i) Pemberdayaan masyarakat informasi.

H. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS STRUKTUR DAN POLA TATA RUANG

1. Struktur Tata Ruang Daerah Kabupaten Klungkung

Peluang :

- a) Berpotensi mendorong perkembangan ekonomi sekitar Daerah Kabupaten Klungkung.
- b) Perkembangan wilayah dalam konstelasi regional Daerah Kabupaten Klungkung, termasuk pengembangan wilayah timur.
- c) Kuatnya daya tarik Daerah Kabupaten Klungkung dalam segala bidang dan sektor .

Tantangan :

- a) Sebagai pengembangan kawasan timur akan berperan sebagai pusat pelayanan jasa, industri dan perdagangan di wilayah timur.
- b) Penanganan atas isu global dan tekanan internal.
- c) Dinamisnya kondisi investasi di Daerah Kabupaten Klungkung
- d) Pesatnya perkembangan kegiatan sektoral yang memerlukan pengaturan penggunaan lahan (industri, perdagangan, dan jasa)
- e) Daya dukung lingkungan yang menurun, akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan.
- f) Penataan ruang yang belum konsisten.

Isu Strategis :

- a) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan tata ruang.
- b) Memantapkan struktur dan hirarki sistem kota-desa.
- c) Pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan.

- d) Menjembatani kebijakan RTRW Provinsi yang bersifat makro dengan kebijakan RTRW Kabupaten/Kota yang bersifat parsial.
- e) Meningkatkan peran dunia usaha dan daya saing melalui penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah.
- f) Mendorong penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian lingkungan serta budaya.
- g) Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan penataan ruang.
- h) Mendorong pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan seimbang.
- i) Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta penurunan muka air tanah .

2. Pola Ruang Daerah Kabupaten Klungkung

Peluang :

- a) Aksesibilitas yang baik dari segala penjuru
- b) Tersedianya lahan guna pengembangan wilayah
- c) Kondisi alam yang mendukung wisata agro
- d) Suasana kondusif

Tantangan :

- a) Aturan dan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota (RTRW) sangat lemah.
- b) Belum tersusunnya penataan ruang secara detail pada kawasan-kawasan strategis.
- c) Berkurangnya lahan subur pertanian dan lahan resapan air
- d) Menurunnya produksi pertanian.
- e) Konversi lahan.

Isu Strategis :

- a) Penguatan lembaga yang terkait dalam penataan ruang.
- b) Menyusun peraturan daerah tentang rencana umum dan rencana detail.

- c) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- d) Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan maupun non- hutan sebesar 30 % .
- e) Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis.
- f) Mitigasi resiko bencana.
- g) Pembangunan Pelabuhan.
- h) Pengembangan Kawasan Pusat Perdagangan, Kawasan Agropolitan, dan Kawasan Pariwisata (DTW).
- i) Pembangunan ibu kota kecamatan Nusa Penida

I. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

1. Pemerintahan

Peluang :

- a) Besarnya ketertarikan para pemimpin nasional terhadap Daerah Kabupaten Klungkung.
- b) Besarnya perhatian dunia internasional terhadap Daerah Kabupaten Klungkung.
- c) Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan *good governance*.
- d) Semakin kuatnya *civil society* .
- e) Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.
- f) Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung secara otonomi melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain.

Tantangan :

- a) Besarnya tuntutan masyarakat.
- b) Dinamisnya aspirasi masyarakat.
- c) Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.
- d) Semakin kuatnya pengaruh globalisasi.
- e) Banyaknya tawaran kerjasama dari berbagai pihak.
- f) Peningkatan kualitas aparatur dalam penanganan kerjasama

Isu Strategis :

- a) Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas.
- b) Optimalisasi kapasitas aparatur daerah.
- c) Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan *civil society*.

2. Hukum

Peluang :

- a) Kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam penegakan hukum di mata masyarakat sangat tinggi.
- b) Nilai sosial budaya masyarakat yang cenderung adaptif terhadap tatanan hukum.
- c) Terdapatnya lembaga swasta yang peduli hukum sehingga dapat dijadikan mitra dalam membangun hukum di Daerah Kabupaten Klungkung.

Tantangan :

- 1) Implementasi dari peneguhan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
- 2) Kesiapan aparatur penegak hukum untuk melakukan reformasi di bidang hukum yang menjadi kewenangannya.

Isu Strategis :

Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur dan masyarakat yang adil dan responsif hukum.

3. Politik

Peluang :

- a) Banyaknya organisasi politik penyalur aspirasi memudahkan masyarakat dalam menentukan saluran aspirasi yang sesuai dengan kehendak masyarakat.
- b) Banyaknya lembaga pemberdayaan masyarakat di Daerah Kabupaten Klungkung.